

**IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA
PADA PEMILUKADA LAMPUNG BARAT TAHUN 2017**



S k r i p s i

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh :

NETY RHOHMAYANTI

NPM: 1331040096

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA
PADA PEMILUKADA LAMPUNG BARAT TAHUN 2017**

Pembimbing I : Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag

Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.IP

S k r i p s i

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh :

NETY RHOHMAYANTI

NPM: 1331040096

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA PADA PEMILUKADA LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

Oleh

Nety Rhohmayanti

Demokrasi adalah sebuah system pemerintahan yang berasal dari Yunani Kuno yang tidak beragama Islam dan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis Islam yang ada di Indonesia. Sebagai unsure Negara yang berada dibawah naungan Negara demokrasi, pondok pesantren harus mengikuti kebijakan-kebijakan demokrasi, terlepas dari kebijakan itu berasal dari ajaran Islam atau bukan.

Perbedaan basis dari demokrasi dan pondok pesantren menghasilkan kerancuan dalam prakteknya. Disatu sisi pondok pesantren harus menjalankan praktek berbasis agama Islam, disisi lain Negara juga harus menjalankan praktek berbasis demokrasi. Kerancuan yang timbul kemudian kerap menjadikan pondok pesantren tidak mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan demokrasi tersebut. Terutama pada kebijakan mengenai pergantian pemimpin yang dalam Negara demokrasi dilakukan melalui pemilihan Umum. Salah satu pemilihan umum yang dilakukan dinegara Republik Indonesia adalah pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017. Pondok pesantren Miftahul Huda 06, yang secara administrasi berdiri di daerah Lampung Barat pun harus mengikuti kebijakan Negara demokrasi berupa pemilihan umum kepala daerah tersebut. Namun, tidak seperti yang disajikan teori bahwa pondok pesantren dan demokrasi sulit bersatu, pondok pesantren Miftahul Huda justru menunjukkan bahwa pondok pesantren dapat tetap menjalankan praktek keagamaannya tanpa melawan pemerintah negaranya. Bahkan pondok pesantren dapat membantu mewujudkan penyelenggaraan Negara menjadi lebih tertib dan damai. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan nilai Demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06 dalam Pelaksanaan Pemilukada tahun 2017 kabupaten Lampung Barat? 2. Apa yang telah dilakukan oleh pondok pesantren Miftahul Huda 06 mengenai pelaksanaan demokrasi pada santri-santrinya?

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan objek penelitian lapangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *non random sampling* sehingga diperoleh 7 orang sampel . Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah *interview* dan *dokumentasi*.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mendapatkan temuan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya penerapan nilai demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06 pada pemilu pada 2017 di Lampung Barat, pondok pesantren Miftahul Huda 06 memberikan kesempatan yang sama kepada santri untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pesta demokrasi tersebut. Mulai dari masa pemilihan hingga masa perhitungan hasil pemilihan. Partisipasi tersebut merupakan upaya pondok pesantren Miftahul Huda 06 dalam menerapkan nilai demokrasi yang berupa persamaan hak bagi setiap warga Negara.
2. Pada saat pelaksanaan demokrasi tahun 2017, pondok pesantren Miftahul Huda 06 melakukan upaya pemberian hak memilih kepada para santrinya dalam mengikuti pelaksanaan demokrasi dengan cara memberikan izin untuk mengikuti pemilu dan memberikan izin cuti bagi para santri yang ingin memilih di daerah asalnya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Demokrasi Di Pondok Pesantren Miftahul
Huda Pada Pemilukada Lampung Barat Tahun 2017**

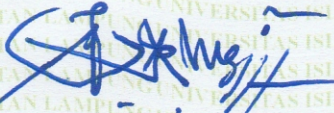
Nama Mahasiswa : **Nety Rhohmayanti**
NPM : **1331040096**
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag

NIP. 195808231993031001


Drs. Agustamsyah, M.Ip

NIP. 196801041994031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam


Dr. Nadirsah Hawari, M.A

NIP. 1974062008011013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL HUDA PADA PEMILU KADA LAMPUNG
BARAT TAHUN 2017**, disusun oleh Nety Rhohmayanti, NPM 1331040096,

Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari
Kamis, 20 September 2018, di Ruang Munaqasyah (Gedung Dekanat Baru Lt. 3)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Nadirsah Hawari, M.A (.....)

Sekretaris : Tin Amalia Fitri, M.Si (.....)

Penguji I : Drs. Efendi, M.Hum (.....)

Penguji II : Drs. Agustamsyah, M.I.P (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag
NIP. 195808231993031001**

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asysyura:38)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ku persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih kepada yang terkasih :

1. Kedua orang tuaku : Bapak Dedi Suherman dan Ibu Siti Nurainun, atas pengorbanan selama ini sejak masih dalam kandungan sampai usia sekarang, yang tidak pernah lelah dan bosan dalam bekerja dan berdo'a untuk anak-anaknya, hanya Allah yang dapat membalasnya.
2. Kakakku Tatang Nuryadin dan Lydia Sari, kakakku Aan Syaiful Anwar serta adikku Wilda Nur Inayah, dan Keponakan ku M. Aqil Akbar, M. Azis Alfahrizi, Zafira Rana Nabaha yang selalu memberikan dorongan dan semangat demi keberhasilanku.

RIWAYAT HIDUP

Nety Rhohmayanti dilahirkan di desa Liman Sari, Kecamatan Blitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan pada tanggal 06 april 1995. Anak ke tiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Dedi Suherman dan Ibu Siti Nurainun.

Jenjang Pendidikan Formal yang penulis jalani adalah:

1. SD Muhammadiyah Tanjung Mas, kecamatan Blitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tamat pada tahun 2007.
2. SMP Negeri 1 Buay Madang Timur kecamatan Ogan Komering Ulu Timur, tamat pada tahun 2010.
3. MA YAPSI Sumber Jaya Lampung Barat, tamat pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pengalaman kerja dan organisasi:

1. Penulis pernah aktif sebagai kader dari UKM BAPINDA (Seni Budaya Islam) pada tahun 2013-2014
2. Menjadi anggota organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) pada tahun 2014-2016.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirohmaanirrohiim

Dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Allah SWT yang harus mengabdikan sekaligus bertafakur dihadapannya, kiranya suatu tuntunan illahi yang harus dilaksanakan, dimana seorang hamba mempunyai tanggungjawab untuk mengemban amanah sekaligus kewajiban yang bersifat mutlak, maka dalam kesempatan ini merupakan ungkapan rasa syukur penulis sehingga dapat merealisasikan gagasan-gagasan dalam wujudnya, berupa karya ilmiah (skripsi) sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sosial dalam fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, juga menggali ilmu-ilmu yang ada baik yang diperoleh di bangku perkuliahan maupun dari yang lainnya, khususnya yang menyangkut masalah Pemikiran Politik Islam.

Sehubungan dengan terwujudnya karya ilmiah ini yang merupakan upaya penulis secara optimal dengan wujud: “Implementasi Demokrasi Di Pondok Pesantren Miftahul Huda Pada Pemilu Pilkada Lampung Barat Tahun 2017”

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, kiranya tidak berlebihan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan nasehat dan motivasi tidak henti-hentinya kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Nadirsah Hawari, M.A dan Tin Amalia Fitri, M. Si selaku ketua dan sekretaris jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberi nasehat, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah memberikan nasehat dan pengarahan serta motivasi yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Drs.Agustamsyah, M.Ip sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat dan pengarahan serta motivasi yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Keluarga besar UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, UPTD Perpustakaan Kota Bandar Lampung, dan UPTD Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam buku literature yang dibutuhkan.

7. Kyai Babussalam Asysya'roni selaku pengasuh pondok esantren Miftahul Huda 06 yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk mengadakan penelitian demi tersusunnya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2013.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas bantuan dan jerih payah dari semua pihak menjadi satu catatan ibadah disisi Allah SWT, Amin

Bandar Lampung, juni 2018

Penulis

Nety Rhohmayanti

NPM : 1331040096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Tinjauan Pustaka.....	12
BAB II PEMILU DAN DEMOKRASI DI PONDOK PESANTREN.....	14
A. Demokrasi	14
1. Pengertian Demokrasi	14
2. Sejarah Demokrasi	15
3. Nilai-nilai Demokrasi.....	16
B. Pondok Pesantren.....	21
1. Definisi Pondok Pesantren	21
2. Klasifikasi Pondok Pesantren	29
3. Peran dan Fungsi Pondok Pesantren	32
4. Peran Kyai dalam Pondok Pesantren	36
C. Pemilihan Umum	39
1. Pengertian Pemilihan Umum	39
2. Tujuan Pemilihan Umum	40
3. Kampanye dalam Pemilihan Umum	42
BAB III PROFIL PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA 06 DAN PENERAPAN DEMOKRASI	44
A. Pondok Pesantren Miftahul Huda	44
B. Nilai demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06.....	55
C. Penerapan demokrasi pada pemilu pada 2017 di pondok pesantren miftahul huda	63
BAB IV IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA LAMPUNG BARAT PEMILUKADA TAHUN 2017.....	70
A. Penerapan Nilai Demokrasi di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06.....	70

B. Implementasi demokrasi di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 lampung barat pada pemilu pada tahun 2017.	77
--	----

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan	88
B. Saran – Saran	89
C. Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul proposal skripsi ini adalah **“Implementasi Demokrasi Di Pondok Pesantren Miftahul Huda Pada Pemilu Pilkada Lampung Barat Tahun 2017”**.

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah–istilah yang terdapat di dalamnya. Istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹ Sedangkan menurut Arifin, implementasi diartikan sebagai tindakan untuk melaksanakan dan menerapkan suatu ide atau gagasan. Didalam implementasi terdapat beberapa tahapan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.²

Sedangkan menurut penulis yang dimaksud dengan implementasi dari judul skripsi ini adalah penerapan system yaitu system demokrasi yang ada dipondok pesantren Miftahul Huda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *demokrasi* berarti sebagai berikut:

¹ Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 432

² Arifin, Ahmad, *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi Dan Aktualisasi Pendidikan Islam Ditengah Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 42

1. bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisipasi);
2. gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.³

Dari akar kata diatas, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua arti, yaitu:

1. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Hal ini sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (*demos*: rakyat, dan *cratein*: memerintah). Maka secara harafiah, demokrasi berarti rakyat memerintah.
2. Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup. Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat⁴

Pondok Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri⁵ menurut mastuhu, Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam yang berfokus untuk memahami menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam (tafaqquh

³Depdiknas, Op.Cit, hlm 115.

⁴Winanti, S. Poppy dan Titok Hariyanto, *Demokrasi dan Civil Society*. (Yogyakarta: IRE Press, 2004), hlm. 14.

⁵Depdiknas, Op.Cit, hlm 684

fiddiin) dengan menekankan pentingnya moral agama islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka maksud dari judul ini adalah melakukan penyelidikan mengenai penerapan asas demokrasi (pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban warga negaranya) yang dilakukan di pondok pesantren miftahul huda pada Pemilihan bupati di Lampung Barat pada tahun 2017.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang mendorong dan memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul proposal skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Implementasi demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda menarik untuk diteliti karena budaya yang biasa hidup di pondok pesantren adalah tergantung pada otoritas pilihan kiyai nya namun dipondok pesantren Miftahul Huda menjunjung tinggi nilai Demokrasi.
2. Pondok pesantren merupakan salah satu sarana pembelajaran yang menurut penulis cocok untuk pengembangan demokrasi.
3. Implementasi demokrasi merupakan judul yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin
4. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan skripsi ini.

⁶ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm 5.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, Indonesia senantiasa berupaya untuk benar-benar mewujudkan sistem yang menjunjung tinggi peran serta masyarakatnya dalam menentukan laju pemerintahan. Disetiap kelompok masyarakat selalu diupayakan untuk menentukan keputusan dengan mencari suara terbanyak. Terlebih untuk permasalahan yang menyangkut pemerintahan atau politik.

Sistem pemerintahan demokrasi memang selalu mengutamakan musyawarah dari masyarakatnya dalam menentukan sebuah keputusan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menentukan sendiri bagaimana dan siapa pemimpin yang akan memimpin mereka.

Namun nyatanya, tidak semua kelompok masyarakat yang benar-benar merealisasikan kebebasan memilih bagi anggota kelompoknya, ada banyak sekali kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan dalam menyelenggarakan demokrasi. Penyimpangan yang sering terjadi pada sistem demokrasi adalah adanya pemaksaan dari pihak calon pemimpin langsung terhadap warganya. Pemaksaan ini misalnya dilakukan dengan praktek money politik sehingga masyarakat memilih mereka bukan karena hati nurani melainkan karena telah diberikan sejumlah uang dan biasanya juga telah dijanjikan hal lain pasca pemilu. Praktek ini sepintas memang tidak menampakkan adanya pemaksaan terhadap warga masyarakat, namun pada hakikatnya masyarakat diberikan tekanan sehingga mereka memilih bukan karena memikirkan pemerintahan yang akan berlangsung

ditangan pemimpin pilihan mereka, namun mereka memilih karena digiring dengan uang.

Penyimpangan lain yang sering terjadi Misalnya berjalannya sistem pembelian suara terhadap warga. transaksi suara ini dilakukan oleh calon pemimpin dengan *stakeholder* daerah tersebut. Misalnya transaksi suara dilakukan oleh calon bupati dengan kepala desa, dengan ketua pemuda atau yang semisalnya, hal ini biasanya terjadi pada daerah pedalaman yang warganya masih terbatas dalam mengakses informasi dari luar. Sehingga warganya ikut dengan apa yang dikatakan oleh stakeholder daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan hak berpendapat dan menentukan pilihan bagi warga daerah tersebut seakan dirampas oleh para pemimpin mereka. Pondok pesantren sebagai sebuah kelompok masyarakat pun mengalami penyimpangan yang seperti ini. Para santri dan ustad yang berada di pondok pesantren akan tunduk dengan apa yang sudah ditentukan oleh kiyai atau pengasuh pondok pesantren tersebut. Jika sang pengasuh pondok pesantren mengatakan mereka harus memilih calon A, maka semua suara akan diarahkan ke calon tersebut. Namun hal ini nampaknya tidak berlaku pada Pondok Pesantren Miftahul Huda yang terletak di pekon Sukapura kecamatan Sumberjaya kabupaten Lampung Barat.

Pondok pesantren yang mengutamakan pendidikan berbasis Salafi/kajian kitab-kitab klasik dengan sistim kelas/tingkatan dan mengusung 3 program pesantren ini menerapkan sistem pembelajaran yang mendukung terselenggaranya demokrasi yang seutuhnya. Hal ini terlihat dari terbaginya suara anggota pondok pesantren tersebut pada setiap pesta demokrasi didaerah tersebut. Terutama pada

pemilihan bupati kabupaten lampung barat pada tahun 2017. Pemilu yang mengedepankan dua pasang calon tersebut berlangsung dengan tertib pada daerah sukapura kecamatan sumberjaya yang merupakan lokasi berdirinya pondok pesantren Miftahul Huda.

Perbedaan sistem pada pondok pesantren inilah yang kemudian menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pondok pesantren Miftahul Huda dalam menerapkan demokrasi pada anggota pondok pesantren tersebut dalam pemilihan umum kepala daerah Lampung Barat tahun 2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang telah dilakukan oleh pondok pesantren Miftahul Huda 06 mengenai pelaksanaan demokrasi pada santri-santrinya?
2. Bagaimana penerapan nilai Demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06 dalam Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2017 kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Apa yang telah dilakukan oleh pondok pesantren Miftahul Huda 06 mengenai pelaksanaan demokrasi pada santri-santrinya

- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai demokrasi di pondok pesantren miftahul huda 06 pada pemilu pada Lampung Barat tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan mengenai implementasi demokrasi.
- b. Secara praktis, bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat mengetahui terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan implementasi demokrasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁷ Guna mencari sumber data yang dibutuhkan mengenai implementasi demokrasi di pondok pesantren miftahul huda pada pemilu pada Lampung Barat tahun 2017, penulis akan secara langsung melakukan penelitian di Pondok Pesantren Miftahul Huda Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Yaitu penelitian yang menjadi prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat

⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.⁸ Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan demokrasi di pondok pesantren miftahul huda pada pemilukada kabupaten Lampung Barat. Menurut Irawan Soehartono penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.⁹

Jalaludin Rahmat dalam musa mengatakan bahwa penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, penelitian deskriptif dilakukan untuk:

- 1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
- 2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku
- 3) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.¹⁰

Penelitian ini akan menggambarkan dan mengungkap data-data dan juga menganalisis data untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran tindakan, aksi maupun kegiatan-kegiatan di pondok pesantren miftahul huda dalam menerapkan demokrasi pada pemilukada kabupaten Lampung Barat.

⁸Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), hlm.63.

⁹Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1998), hlm.8

¹⁰Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984), hlm. 34

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pengurus pondok pesantren miftahul huda, yang berjumlah 107 orang terdiri dari 86 orang santriwan/santriwati yang sudah memiliki hak pilih, 20 orang ustadz dan satu orang kiyai atau pengasuh pondok pesantren.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹² Dalam pemilihan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sample. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel juga harus didasarkan atas ciri - ciri, sifat – sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri – ciri pokok populasi.¹³ Adapun ciri-ciri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kiyai/pimpinan pondok pesantren
- 2) Ustadz yang sudah mengabdikan selama lebih dari 5 tahun
- 3) Santriwan/santriwati yang sudah berumur 17 tahun pada tahun 2017 atau sudah memiliki hak pilih pada tahun 2017.
- 4) Santriwan/santriwati yang telah menjadi santri selama lebih dari 3 tahun
- 5) Santriwan/santriwati yang menjadi pengurus pesantren.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (ed. revisi V, cet. XII), (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 108.

¹²*Ibid*, hlm.109.

¹³*Ibid*. hlm. 117.

Dari kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 3 orang santri, 2 orang santri pengurus, 2 orang ustadz dan 1 orang pimpinan pondok pesantren atau kiyai. Sehingga keseluruhan sampel dari penelitian ini berjumlah 8 orang

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data primer dari pondok pesantren miftahul huda.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan hasil historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.¹⁵ Penulis akan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan implementasi demokrasi di Pondok Pesantren Miftahul Huda

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya– jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

¹⁴Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (ed. I), (Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm. 44.

¹⁵*Ibid.*

langsung informasi – informasi atau keterangan –keterangan.¹⁶Penulis akan melakukan wawancara mengenai imlementasi demokrasi yang dilakukan Pondok Pesantren Miftahul Huda pada pemilkada Lampung barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, berita-berita tentang pesantren, isu-isu yang berkaitan dengan dmokrasi yang ada dipondok pesantren dan sebagainya.¹⁷Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip–arsip atau dokumen maupun keterangan yang berhubungan masalah yang ada.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁸

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (cet. XIII), (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 83.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.* hlm. 206.

¹⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analiis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hlm.15.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Kemudian akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam fikiran penganalisis selama ia menulis.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian dalam proposal ini sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul : “ *Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf di Pondok Pesantren Dalam Upaya Menghadapai Era Globalisasi (Studi kasus di Pondok Pesantren Al- Fatah Temboro Magetan)*“ oleh Subhan Murtodo jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi tersebut menjelaskan tentang

Implementasi nilai-nilai tasawuf di pondok pesantren Al-Fatah Temboro Malang dilakukan dengan cara Takhali, Tahalli, dan Tajjali. Faktor yang mendukung proses Implementasi Nilai Tasawuf di Pondok Pesantren Al-Fatah yaitu adanya tharekat Naqshabandiyah Qholidiyah yang Muktabaraoh.

2. Skripsi yang berjudul : *“Implementasi Nilai – Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Smp Negeri 3 Gringsing Batang”* Oleh Rini Yuliana, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2013. Skripsi diatas menjelaskan tentang implementasi nilai nilai demokrasi pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang telah dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama antara siswa dengan pendidik yang diwujudkan dalam nilai-nilai demokrasi, yaitu: (1) Toleransi, (2) kerjasama (3)kebebasan berpendapat, (4) kebebasan berkelompok, (5) menghormati orang lain, (6) kepercayaan diri dan (7) kesadaran akan perbedaan. Faktor pendorong implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang diantaranya : (1) Kurikulum, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Budaya Sekolah yang menganut pada budaya disiplin dan (4) Kepemimpinan. Faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang diantaranya : (1) Dukungan orangtua, (2) Lingkungan masyarakat, (3) Keterbatasan biaya dan (4) Perbedaan individual.

3. Skripsi yang ditulis oleh Romsy “Kontribusi KH. Moh. Khazin Ilyas Syarqawi dalam Membina Sistem Pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah.” Skripsi tersebut menjelaskan tentang Pemikiran KH. Khazin Ilyas

tentang pendidikan formal di Annuqayah. Selain itu, skripsi tersebut juga menjelaskan mengenai kontribusi KH. Khazin terhadap sistem pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah dalam bidang kelembagaan, yaitu membuat silabi terendiri, yang diberikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah.

Penelitian yang akan peneliti bahas berbeda dengan karya yang telah disebutkan diatas. Peneliti memfokuskan pada implementasi demokrasi di Pondok Pesantren Miftahul Huda dalam pemilukada di Lampung barat tahun 2017.

BAB II

PEMILU DAN DEMOKRASI DI PONDOK PESANTREN

A. Demokrasi

1. Pengertian demokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *demokrasi* berarti sebagai berikut:

- a. bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisipasi);
- b. gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.¹

Dari akar kata diatas, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua arti, yaitu:

- a. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Hal ini sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (*demos*: rakyat, dan *cratein*: memerintah). Maka secara harafiah, demokrasi berarti rakyat memerintah.
- b. Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup. Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat²

¹Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 115.

²Winanti, S. Poppy dan Titok Hariyanto, *Demokrasi dan Civil Society*. (Yogyakarta: IRE Press, 2004), hlm. 14.

2. Sejarah demokrasi

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menganut pemerintahan tertinggi oleh rakyat diklaim sudah mulai muncul sejak zaman Yunani kuno. Pericles seperti yang dikutip oleh Abu Bakar Ebyhara, menyatakan bahwa pemerintahan Athena pada abad ke-5 SM sudah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi karena administrasinya berada ditangan banyak pihak.³

Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan.⁴ Demokrasi yang sering diartikan sebagai kekuasaan rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi dapat berarti bahwa keputusan-keputusan penting pemerintahan atau garis kebijaksanaan dibelakang keputusan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung, hanya dapat dijalankan jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah (masyarakat umum selain pemerintah)⁵

3. Nilai-nilai demokrasi

Nilai adalah takaran, harga, banyak sedikitnya isi dan mutu⁶. Demokrasi mempunyai arti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara⁷. Jadi yang dimaksud nilai-nilai demokrasi adalah takaran, harga sebuah gagasan atau pandangan

³Ebyhara, Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik*, (Ar-Ruzz Media, 2016), cet III, hlm. 261.

⁴*Ibid.*

⁵Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.216.

⁶Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 783.

⁷*Ibid*, hlm 249.

hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman dalam masyarakat, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Lebih lanjut John Dewey dalam Zamroni menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah: kebebasan, toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku.⁸ selain nilai-nilai tersebut, Budi Hardiman juga menambahkan bahwa nilai yang harus ada dalam sebuah pemerinyahan demokrasi adalah nilai persamaan hak.⁹

1) kebebasan

Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat seorang warga masyarakat¹⁰. jika dicermati tentang kebebasan seorang individu, ada dua hal yang patut di perhatikan yaitu bebas liar dan bebas bertanggung jawab. Bebas liar dengan semaunya sendiri, seperti kebut-kebutan di jalan umum, main music sampai tengah malam di lingkungan perumahan dan lainnya bukanlah perbuatan yang dibenarkan. Kebebasan

⁸Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), hlm 201

⁹Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Jurgen habermas*, (Jakarta: Yogyakarta: 2009), hlm. 66

¹⁰Harjono, *Negara Hukum, Demokrasi. Dan Makamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif (Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum, volume II Nomor III, 2010,) hlm. 7

yang menjadi nilai dari demokrasi tentunya bukan bebas yang liar, yang sewenang-wenang, namun yang menjadi nilai demokrasi adalah bebas yang bertanggung jawab. Bebas yang bertanggung jawab adalah kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dengan tidak mengganggu orang lain. Kebebasan yang dimiliki adalah juga terbatas, yaitu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Selain kebebasan untuk melakukan kehendak dan mengekspresikan diri, juga perlu diperhatikan tentang kebebasan dari penindasan. Pihak yang kuat tidak boleh melakukan penindasan terhadap pihak yang lemah. Pihak yang mayoritas tidak boleh menindas pihak yang minoritas. Pihak penguasa tidak boleh menindas rakyat jelata. Pemilik modal besar tidak boleh melakukan monopoli sebuah bisnis

Ada beberapa kelompok kebebasan, yaitu Kebebasan social-politik dan Kebebasan individual.¹¹ Pembedaan kelompok tersebut didasarkan kepada subyek dari kebebasan itu sendiri. Kebebasan social-politik memberi kebebasan kepada suatu bangsa dan Negara untuk menentukan ideologi bangsa dan negaranya. Kebebasan individual memberikan kebebasan kepada manusia perorangan.

2) Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial dimasyarakat maupun hak-hak yang lain.

¹¹ K. Bertam, *Etika*, cetakan kedelapan, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm 92

Dalam masyarakat demokratis seseorang berhak memiliki pandangan nya sendiri , tetapi ia akan memegang teguh pendiriannya itu dengan cara yang toleran terhadap pandangan orang lain yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi berbeda dengan sikap permisif, yaitu sikap serba membolehkan sesuatu. Sebagai nilai, toleransi dapat mendorong tumbuh nya sikap toleran terhadap keanekaragaman, sikap saling percaya dan kesediaan untuk bekerja sama antar pihak yang berbeda-beda keyakinan, prinsip, pandangan dan kepentingannya.

Toleransi pada dasarnya adalah rasa saling menghargai perbedaan dan membiarkan keagamaan sebagai sifat alamiah. Toleransi juga merupakan implikasi dari kebebasan manusia dalam tataran sosial. Toleransi merupakan konsekuensi dari realitas masyarakat yang bertujuan membentuk dinamika sosial yang harmonis.

2) Menghargai perbedaan pendapat.

Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain.

3) Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat

Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku,

maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung setinggi-tingginya dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul dimasyarakat adalah perpecahan.

4) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia

Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu dengan yang lain.

5) Pengendalian diri

Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

6) Kemanusiaan dan kebersamaan

Sikap kemanusiaan dan kebersamaan sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan.

7) Kepercayaan diri

Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu

menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain.

8) persamaan hak

Menurut Budi Hardiman, demokrasi menuntut adanya persamaan hak, keadilan semua agama, keadilan antara laki-laki dan perempuan, hamonisasi pemerintah dan rakyat, orang dewasa dan anak-anak, dan semua individu yang terlibat dalam negara¹²

Persamaan hak ini dimaksudkan agar semua masyarakat yang berada dibawah naungan Negara penganut system demokrasi dapat mengatur sendiri apa yang menjadi keinginannya tanpa membedakan dari kalangan mana masyarakat tersebut berasal.

9) Ketaatan pada peraturan yang berlaku

Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama-sama sebab peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Ketaatan dan kepatuhan juga merupakan modal yang utama bagi setiap orang untuk mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan. Wujud ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat:

¹² Budi Hardiman, Op.Cit, hlm 66

- a) Pengendalian tutur kata
- b) Tidak melukai perasaan orang lain
- c) Keluhuran nilai kemanusiaan
- d) Pengakuan adanya kelebihan manusia dan makhluk yang lain
- e) Perbuatan tidak merendahkan nilai kemanusiaan

Dengan demikian, nilai demokrasi secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan bertindak. Nilai yang dikemukakan diatas sesuai dengan apa yang menjadi nilai demokrasi dan perilaku yang ditanamkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan atau golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

B. Pondok Pesantren

1. Definisi Pondok Pesantren

Pada dasarnya Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama (Pondok) dengan kyai sebagai tokoh sentralnya

dan masjid sebagai pusat lembaganya. Sejak awal pertumbuhannya, Pesantren memiliki bentuk yang beragam sehingga tidak ada suatu standarisasi yang berlaku bagi semua pesantren. Namun demikian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Pesantren tampak adanya pola umum, yang diambil dari makna peristilahan Pesantren itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu pola tertentu.¹³

Perkataan Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an, berarti tempat tinggal para santri. A.H. Johns berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari kata shastri yang diambil dari bahasa India yang berarti orang yang mengetahui kitab suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Chatuverdi dan Tiwari mengatakan bahwa kata santri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci (buku-buku agama) atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.¹⁴

Adanya kaitan istilah santri yang dipergunakan setelah datangnya agama Islam dengan istilah yang dipergunakan sebelum kedatangan Islam adalah suatu hal yang wajar terjadi. Sebab seperti telah dimaklumi bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah menganut beraneka ragam agama dan kepercayaan, termasuk di antaranya agama Hindu. Dengan demikian dapat saja terjadi istilah santri itu telah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan

¹³Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993), hlm. 3

¹⁴Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 18.

Islam. Bahkan sebagian ada juga yang menyamakan tempat pendidikan itu dengan agama Budha dari segi bentuk asrama.¹⁵

M. Qamar mendefinisikan Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari Leadership seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independent dalam segala hal.¹⁶

Biasanya seorang tamatan pesantren tertentu dan ia berhasil menjadi tokoh di daerah asalnya, akan berperan sebagai perantara aktif antara masyarakat yang dipimpinnya dengan pesantren tempat dahulu ia belajar. Misalnya sambil bersilaturahmi kepada kyai yang telah mendewasakan ilmunya, seringkali bekas santri tersebut membawa serta calon santri baru, bahkan dana atau sumbangan material yang lain. Dengan hubungan yang seerat ini, lagi-lagi akan menjadi pendukung yang tangguh bagi kelanjutan hidup pesantren tersebut

Sebagai lembaga pendidikan yang dikelola seutuhnya oleh kyai dan santri, keberadaan Pesantren pada dasarnya berbeda di berbagai tempat dalam kegiatan maupun bentuknya. Meski demikian, secara umum dapat dilihat adanya pola yang sama pada Pesantren. Zamakhsyari Dhofier menyebutkan lima elemen dasar yang

¹⁵Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 8

¹⁶Mujamil Qamar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 2

harus ada dalam Pesantren, yaitu : pondok, masjid, santri, kyai, kitab pokok pengajaran¹⁷

a) Pondok,

Pondok sebagai asrama santri merupakan syarat pokok suatu pesantren, oleh karena itu sebutan untuk lembaga semacam ini terkenal dengan nama “pondok pesantren”. Ada beberapa alasan pokok pentingnya unsur pondok dalam suatu pesantren:

pertama, banyaknya santri yang berasal dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kyai yang termashur. *Kedua*, adanya hubungan timbal balik antara kyai dan santri. *Ketiga*, suasana belajar santri dan perilaku kehidupan santri dapat diawasi dan dibimbing oleh kyai. Sehingga penanaman nilai-nilai pengamalan terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh dalam setiap proses belajar yang diikutinya. Santri dapat dikondisikan dalam suasana belajar sepanjang hari dan malam, sehingga waktu-waktu yang dipergunakan santri tidak ada yang terbuang secara percuma

b) masjid, sebagai sentral peribadatan dan pendidikan Islam

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik shalat, khutbah, dan shalat jum'at, dan juga pengajaran kitab-kitab islam klasik. Dalam konteks pesantren, masjid dan kyai adalah dua hal yang memiliki

¹⁷ Dhofier, Zamakhsyari, Op.Cit., hlm. 68.

keterkaitan erat satu dengan yang lainnya. Masjid digunakan oleh kyai sebagai pusat kegiatan.

Secara historis, masjid adalah lembaga pendidikan islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Di masa itu, masjid bukan saja sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat kegiatan lainnya

c) santri, sebagai peserta didik

Santri juga sebagai unsur penting dalam pesantren, kyai tanpa santri ibarat raja tanpa rakyat. Santri adalah orang yang sedang mengeyam pendidikan agama di pesantren. Selama menimba ilmu di pesantren, ia juga akan ditanamkan nilai-nilai yang akan membentuk karakter santri, nilai-nilai itu tercermin dalam panca jiwa yang dimiliki semua santri yaitu: keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah dan kebebasan.

Dalam tradisi pesantren dapat ditemukan dua macam status santri, yaitu santri mukim dan santri kalong. Yang dimaksud dengan santri mukim adalah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan karena itu memiliki probabilitas yang tinggi untuk menetap didalam kompleks pesantren. Biasanya santri mukim inilah yang akan tinggal di pesantren dalam waktu yang lama. Adapun yang dimaksud dengan santri kalong adalah mereka yang berasal dari sekeliling pesantren. Mereka ini memiliki rumah yang letaknya tidak jauh dari pesantren.

Santri di pesantren mengemban amanah untuk belajar mendalami ajaran agama (*tafaqquh fiddin*) guna memperoleh bekal ilmu yang mencukupi sebagai modal untuk berjuang menyebarkan ajaran agama islam

d) kyai, sebagai pemimpin dan pengajar di Pesantren; dan

Kyai menduduki posisi strategis dan peran sentral dalam kehidupan suatu pesantren. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik, alim, dan memiliki kemampuan mengenai agama dan ekonomi yang memadai di tengah pondok pesantren. Kyai tidak hanya mengajar dan mendidik santri, lebih dari itu ia mengatur kehidupan ekonomi, rohani, mobilitas dan seluruh lalu lintas kegiatan dalam pesantren.

Keberadaan pesantren tidak bisa dilepaskan dari kyai, ia yang memberi landasan system, tempat dimana ia mengembangkan ajaran dan pengaruhnya melalui pengajaran. Kyai hanya bertugas sebagai dewan penasehat pesantren atau juga mengajar kepada santri dalam mata pelajaran tertentu dalam alokasi waktu yang terbatas.

e) pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning).

Secara sederhana kitab-kitab islam klasik yang berbahasa Arab dan ditulis menggunakan aksara arab, dan dapat dipahami sebagai kitab kuning atau kitab gundul. Kitab-kitab ini biasanya mempunyai format tersendiri yang di tulis diatas kertas berwarna kekuning-kuningan. Akan tetapi, Azra menambahkan bahwa kitab kuning tidak hanya menggunakan bahasa Arab, tetapi juga bahasa lokal (daerah), seperti: melayu, jawa, dan bahasa lokal lainnya di Indonesia dengan menggunakan aksara arab. Dengan demikian, selain ditulis oleh ulama di timur tengah, juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri. Kitab kuning ini sering kali dijadikan pembeda antara kaum tradisionalis dengan modernis.

Saat ini, meskipun pesantren kebanyakan meng-akomodasi sejumlah mata pelajaran umum untuk diajarkan di pesantren, tetapi pengajaran kitab-kitab islam klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia kepada paham islam tradisional. Yang dimaksud paham tradisional disini merujuk kepada kitab-kitab islam klasik karangan ulama yang beraliran syafi'iyah. Dalam kaitan ini, kitab-kitab islam klasik yang diajarkan di pesantren dapat di golongkan kedalam delapan kelompok, yaitu: nahwu dan shorrof, fiqh, ushul fiqh, hadist, tafsir, tauhid, tasawwuf, serta cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah

Saat sekarang pengertian yang populer dari Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian (tafaqquh fi al-din) dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat. Orientasi dan tujuan didirikannya Pesantren adalah memberikan pendidikan dan pengajaran keagamaan. Pengajaran-pengajaran yang diberikan di Pesantren itu mengenai ilmuilmu agama dalam segala macam bidangnya, seperti tauhid, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, akhlak, tasawuf, bahasa Arab, dan sebagainya. Diharapkan seorang santri yang keluar dari Pesantren telah memahami beraneka ragam mata pelajaran agama dengan kemampuan merujuk kepada kitab-kitab Islam klasik.¹⁸

¹⁸ Haidar Putra Daulay, Op.Cit., hlm. 9

Jadi, yang dimaksud dengan Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam dengan menetap dalam asrama (Pondok) dengan seorang kyai, tuan guru sebagai tokoh utama dan masjid sebagai pusat lembaga dan menampung peserta didik (santri), yang belajar untuk memperdalam suatu ilmu agama Islam. Selanjutnya beberapa karakteristik Pesantren secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pesantren tidak menggunakan batasan umur bagi santri-santri;
- b) Pesantren tidak menerapkan batas waktu pendidikan, karena sistem pendidikan di Pesantren bersifat pendidikan seumur hidup (life-long education);
- c) santri di Pesantren tidak diklasifikasikan dalam jenjang-jenjang menurut kelompok usia, sehingga siapa pun di antara masyarakat yang ingin belajar dapat menjadi santri;
- d) santri boleh bermukim di Pesantren sampai kapan pun atau bahkan bermukim di situ selamanya; dan
- e) Pesantren pun tidak memiliki peraturan administrasi yang tetap. Kyai mempunyai wewenang penuh untuk menentukan kebijaksanaan dalam Pesantren, baik mengenai tata tertib maupun sistem pendidikannya, termasuk menentukan materi/silabus pendidikan dan metode pengajarannya.¹⁹

Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa Pondok Pesantren memiliki program pendidikan yang disusun sendiri (mandiri) di mana program ini mengandung proses pendidikan formal, maupun non formal yang berlangsung sepanjang hari dalam satu pengkondisian di asrama. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa Pondok Pesantren secara institusi atau kelembagaan dikembangkan untuk mengefektifkan dampaknya, Pondok Pesantren bukan saja sebagai tempat belajar melainkan

¹⁹Imron Arifin, op.cit., hlm. 4

merupakan proses hidup itu sendiri, pembentukan watak dan pengembangan sumber daya.²⁰

2. Klasifikasi Pondok Pesantren Berdasarkan perkembangannya,

Pesantren dapat diklasifikasikan kepada empat jenis, yaitu:²¹ Pertama; Pesantren Salafi (tradisional), yaitu Pesantren yang hanya memberikan materi agama kepada para santrinya. Tujuan pokok dari Pesantren ini adalah mencetak kader-kader dai yang akan menyebarkan islam di tengah masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan latar belakang kemunculan Pesantren dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 122 sebagai berikut:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah :122)

²⁰Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 83

²¹M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan islam (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1995, hlm. 243

Pada Pesantren ini, seorang santri hanya dididik dengan ilmu-ilmu agama dan tidak diperkenankan mengikuti pendidikan formal. Walaupun ilmu-ilmu itu diberikan, maka hal itu hanya sebatas pada ilmu yang berhubungan dengan keterampilan hidup.

Kedua; Pesantren Ribathi, yaitu Pesantren yang mengkombinasikan pemberian materi agama dengan materi umum. Biasanya, selain tempat pengajian, pada pesantren ini juga disediakan pendidikan formal yang dapat ditempuh oleh para santrinya. Tujuan pokok dari Pesantren ini, selain untuk mempersiapkan kader dai, juga memberikan peluang kepada para santrinya untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, kelak mereka diharapkan dapat mengisi posisi-posisi strategis, baik didalam pemerintahan ataupun di tengah masyarakat.

Ketiga; Pesantren Khalafi (modern), yaitu Pesantren yang didesain dengan kurikulum yang disusun secara baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Disebut khalafi, karena adanya berbagai perubahan yang dilakukan baik pada metode maupun materi pembelajaran. Para santri tidak hanya diberikan materi agama dan umum, tetapi juga berbagai materi yang berkaitan dengan skill atau vocational (keterampilan).

Keempat; Pesantren Jami" i (asrama pelajar dan mahasiswa), yaitu Pesantren yang memberikan pengajian kepada pelajar atau mahasiswa sebagai suplemen bagi mereka. Dalam perspektif Pesantren ini, keberhasilan santri dalam belajar di sekolah

formal lebih diutamakan. Oleh karena itu, materi dan waktu pembelajaran di Pesantren disesuaikan dengan luang waktu pembelajaran disekolah formal.

Keempat jenis Pesantren tersebut, sudah barang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Proses pembelajaran Pesantren salafi lebih menonjol dalam penguasaan ilmu-ilmu tanzil tetapi lemah dalam penguasaan ilmu-ilmu kauni; Pesantren ribathi membuka peluang kepada para santrinya untuk menjadi dai dan penguasaan ilmu kauni dengan mengikuti sekolah formal tetapi frekuensi waktu untuk penguasaan ilmu-ilmu tanzili menjadi berkurang; Pesantren khalafi lebih menekankan pembaharuan bagi para santrinya dan berorientasi pada peningkatan skill sehingga frekuensi waktu untuk penguasaan ilmu-ilmu tanzili menjadi lebih berkurang; sedangkan proses pembelajaran Pesantren pelajar/mahasiswa sangat tergantung dengan keuangan dan batas waktu mereka dalam mengikuti pendidikan formal. Dengan demikian, setiap jenis Pesantren tersebut di atas pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan dalam penguasaan ilmu, baik ilmu yang bersumber kepada teks-teks tanziliyyah maupun ilmu yang bersumber kepada teks-teks kauniyyah. Kesenjangan tersebut dapat dipahami, karena timbul dari orientasi tujuan Pesantren yang berbeda serta frekuensi waktu yang dialokasikan dalam proses pembelajaran.

3. Peran dan fungsi Pondok Pesantren

Pondok Pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna pada daerah pedesaan. Ia tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak hanya secara kultural bisa diterima, tapi bahkan telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, figur kyai dan santri serta perangkat fisik yang memadai sebuah Pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Latar belakang Pesantren yang paling penting diperhatikan adalah peranannya sebagai transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat yang agamis. Jadi, Pesantren sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur hubungan mereka secara pelan-pelan. Pesantren berupaya merubah dan mengembangkan tatanan, cara hidup yang mampu menampilkan sebuah pola kehidupan yang menarik untuk diikuti, meskipun hal itu sulit untuk diterapkan secara praktis ke dalam masyarakat yang heterogen. Cara memandang kehidupan sebagai peribadatan, baik meliputi kultur keagamaan murni maupun kegairahan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Kecintaan mendalam dan penghormatan terhadap peribadatan dan pengabdian untuk masyarakat itu diletakkan. Kesanggupan untuk memberikan pengorbanan apapun bagi kepentingan masyarakat pendukungnya. Dari penjabaran di atas, fungsi Pesantren jelas tidak hanya

sebagai lembaga pendidikan saja, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama.²² Secara rinci fungsi Pesantren dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Sebagai Lembaga Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan Pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus Pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut Pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran ulama" fiqih, hadits, tafsir, tauhid, dan tasawuf, bahasa Arab (nahwu, sharaf, balaghah dan tajwid), mantik dan akhlaq. Sebagai lembaga pendidikan, Pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan, sedangkan secara khusus Pesantren bertanggung jawab atas tradisi keagamaan (Islam) dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini, Pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan

²² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1994), hlm. 59

hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual.

(b) Sebagai Lembaga Sosial

Sebagai lembaga sosial, Pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di Pesantren relatif lebih murah daripada di luar Pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Beberapa di antara calon santri sengaja datang ke Pesantren untuk mengabdikan dirinya pada kyai dan Pesantren, juga banyak dari para orang tua mengirimkan anaknya ke Pesantren untuk diasuh, sebab mereka percaya tidak mungkin kyai akan menyesatkannya, bahkan sebaliknya dengan berkah kyai anak akan menjadi orang baik nantinya. Di samping itu juga banyak anak-anak nakal yang memiliki perilaku menyimpang dikirimkan ke Pesantren oleh orang tuanya dengan harapan anak tersebut akan sembuh dari kenakalannya. Sebagai lembaga sosial, Pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat, “doa” berobat, dan minta semacam jimat untuk menangkal gangguan. Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumah tangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan

pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu pesantren nampak sebagai sumber solusi, dan acuan dinamis masyarakat, juga sebagai lembaga inspirato (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat.

(c) Sebagai Lembaga Penyiaran Agama (Lembaga Dakwah)

Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak berdirinya Pesantren adalah merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah atau sari" ah di Indonesia. Fungsi Pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pokok Pesantren itu sendiri yakni masjid Pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid Pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majlis ta" lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya oleh masyarakat umum. Dalam hal ini masyarakat sekaligus menjadi jamaah untuk menimba ilmu-ilmu agama dalam setiap kegiatannya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masjid Pesantren, ini membuktikan bahwa keberadaan Pesantren secara tidak langsung membawa perubahan positif terhadap masyarakat, sebab dari kegiatan yang diselenggarakan Pesantren baik itu shalat jamaah, pengajian dan sebagainya, menjadikan masyarakat dapat mengenal secara lebih dekat ajaran-ajaran agama Islam untuk selanjutnya mereka pegang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.²³

4. Peran kyai dalam pondok pesantren

²³Mastuhu, op.cit., hlm. 61

Menurut KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dikutip oleh Zulfi Mubaraq bahwa istilah kyai / kiai / kiyai adalah dunia yang penuh dengan kerumitan, apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Karenanya sangat sulit untuk melakukan generalisasi atas kelompok ulama tradisional yang ada di masyarakat bangsa kita ini.²⁴ Menurut asal-usulnya, perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, yaitu :

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, misalnya "*Kiai Garuda Kencana*", dipakai untuk kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam kepada para santrinya. Selain itu gelar kyai juga sering digunakan untuk menyebut seseorang alim (orang yang dalam pengetahuan agama Islamnya).²⁵

Gelar kyai, kiai atau kiyai semakin membudaya di Indonesia yang sangat diidentikkan dengan agama Islam. Di tengah perkembangan masyarakat Indonesia, pada umumnya dijumpai beberapa gelar atau sebutan yang diperuntukkan bagi ulama, misalnya: di daerah Jawa Barat (Sunda) orang menyebutnya "*Ajengan*", di wilayah Sumatera Barat disebut "*Buya*", di daerah Aceh dikenal dengan panggilan "*Tengku*", di Sulawesi Selatan dipanggil dengan nama "*Tofanrita*", di daerah Madura disebut

²⁴ Mubaraq, Zulfi, *Konspirasi Politik Elit Tradisional di Era Reformasi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2006), hlm. 35.

²⁵ *Ibid*, hlm 36

dengan “*Nun*” atau “*Bindereh*” yang disingkat “*Ra*”, dan di Lombok atau seputar wilayah Nusa Tenggara orang memanggilnya dengan “*Tuan Guru*”.²⁶

Keberadaan seorang kyai dalam sebuah pesantren adalah laksana jantung bagi kehidupan manusia. Begitu urgen dan esensialnya kedudukan kyai, karena dialah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Itulah sebabnya, banyak pesantren yang kemudian merosot pamornya atau bahkan bubar, lantaran ditinggal wafat kyainya, sementara dia tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan pondok pesantrennya atau jika pun ada yang menggantikan namun tidak sepopuler kyai yang terdahulu.²⁷

Kyai seringkali mempunyai kekuasaan yang mutlak atau absolut dalam sebuah pesantren. Berjalan atau tidaknya kegiatan apapun disitu, tergantung pada izin dan restu kyai. Untuk menjalankan kepemimpinannya, unsur kewibawaan memegang peranan penting. Kyai adalah seorang tokoh berwibawa baik dihadapan para ustadz yang menjadi pelaksana kebijakannya, dihadapan santri apalagi, bahkan juga sering dihadapan istri dan anak-anaknya. Ketaatan mereka yang penuh dan tulus kepada kyai, sering bukan karena paksaan, tetapi didasari oleh motivasi kesopanan, mengharapkan barokah, dan tentu saja demi memenuhi ajaran Islam yang menyuruh hormat kepada guru dan orang tua pada umumnya.

Seorang kyai biasanya dipandang sebagai sesepuh, figur yang dituakan. Karenanya selain ia berperan sebagai pemberi nasehat dalam berbagai aspek dan

²⁶Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat, Kyai Pesantren-Kyai Langgar Di Jawa*, (Yogyakarta: LKiS Yogya 1999), hlm. 29.

²⁷ Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), hlm. 90.

persoalan kehidupan, juga ada kalanya dikenal memiliki keahlian dalam hal pengobatan. Kadangkala juga dikenal sebagai tokoh kunci yang kata-kata dan keputusannya dipegang teguh kalangan tertentu, lebih dari kepatuhan mereka terhadap pemimpin formal sekalipun.

Ciri khas lain, bisa dilihat dari kedudukan kyai sebagai pemimpin tunggal dan pemegang otoritas tertinggi di lingkungan pesantren tradisional pada umumnya. Kecenderungan semacam ini, orang menghubungkannya dengan tradisi raja-raja pada masa lalu, yang ditangannyalah puncak kekuasaan, sekaligus pemilik kata akhir bagi setiap kebijakan. Di lingkungan pesantren modern, yang telah mengembangkan sistem kepemimpinan kolektif dengan perangkat organisasi dan manajemen mutakhir, jelas tidak lagi ditemukan gambaran semacam itu.

Jika dicermati lebih lanjut, terlihat bahwa pengaruh utama kyai terhadap kehidupan masyarakat terletak pada hubungan perorangan dengan menembus segala hambatan sebagai akibat perbedaan strata di tengah-tengah masyarakat. Bagi anggota masyarakat luar, pola kehidupan kyai dan pondok pesantrennya merupakan gambaran ideal dan tidak mungkin dapat direalisasi dalam kehidupan masyarakat tersebut.²⁸

Karena demikian besar kekuasaan dan pengaruh seorang kyai atas para santrinya, maka santri akan merasa senantiasa ada keterkaitan yang mendalam terhadap kyai dalam gerak langkahnya, yang secara berangsur akan menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan pribadinya. Secara umum kyai memiliki wewenang penuh di dalam

²⁸Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami, Kyai & Pesantren*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, cet. I, 2007), hlm. 199

membawa perjalanan pesantren untuk diarahkan kepada suatu tujuan yang telah digariskan. Oleh sebab itu proses penyelenggaraan pondok pesantren pun sangat tergantung kepada kyai untuk mengaturnya. Walaupun demikian, biasanya operasional pondok pesantren tetap dilakukan oleh para guru atau para pembantunya.²⁹

C. Pemilihan umum

1. Pengertian pemilihan umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada Negara demokrasi.³⁰ Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³¹

Menurut Harris G. Warren, yang dikutip oleh Ramlan Surbakti, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.³²

²⁹ Mubaraq Zulfi, Op.Cit, hlm. 46

³⁰ Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD, *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, hlm. 315

³¹ Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

³² Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Grasindo, 1992), hlm. 15

Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.³³

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

2. Tujuan pemilihan umum

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang antara lain memberikan amanat untuk penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada prinsip bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilu bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga

³³ *Ibid*

Permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

- a. Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- c. Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
- d. Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- e. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³⁴

Secara umum tujuan pemilihan umum adalah:

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat;
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden;
- d. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib;
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.³⁵

Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum dalam Negara demokrasi berkedudukan sebagai:

- a. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternative kebijakan umum

³⁴Di akses melalui http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39 (7 Januari 2018)

³⁵ *Ibid*

- b. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga;
- c. Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik;³⁶

3. Kampanye dalam pemilihan umum

Menurut Rise and Paisley seperti dikutip oleh Antar Venus dalam buku *Manajemen Kampanye*, kampanye adalah keinginan seseorang untuk mempengaruhi opini individu dan publik, kepercayaan, tingkah laku, minat serta keinginan audiensi dengan daya tarik komunikator yang sekaligus komunikatif.³⁷ Sedangkan Dan Nimmo mengartikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.³⁸

Sedangkan menurut Budi Setiyono, Kampanye adalah sebuah tindakan doktet bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian.³⁹

³⁶ Ramlan Surbakti, Op.Cit, hlm.21.

³⁷ Antar Venus. *Manajemen Kampanye*.(Jakarta : PT Gramedia Utama, 2004), hlm.8

³⁸ *Ibid*

³⁹ Budi Setiyono dan RTS Masli, *Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum*, (Jakarta : AdGoal Com, 2008), hlm. 56

Secara ringkas, kampanye khususnya yang dilakukan dengan tujuan memenangkan pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan oleh komisi pemilihan umum.

Kampanye berusaha untuk mendorong para pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon. Kampanye dilakukan dalam pemilihan umum agar suara yang diperoleh merupakan suara seluruh masyarakat. Untuk meraih sebanyak mungkin pemilih, kandidat perlu melakukan *smart campaign* atau setidaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Model kampanye terbaik adalah sepanjang usia. Asumsinya adalah menjadi orang baik, sehingga orang tersebut akan dipercaya ketika membutuhkan dukungan.
2. Kampanye terbaik adalah mengemukakan citra sosial dan figur diri di depan publik. Dengan demikian publik akan mengerti karakter orang tersebut dan jika perlu sampai sedetil-detilnya (*emotional feelings candidate image*)
3. Praktik kampanye terbaik adalah jika melalui *inducement* atau bujukan yang dapat ditempuh dengan menyampaikan gagasan dari orang ke orang atau dari rumah ke rumah. Cara ini harus diimbangi dengan penguatan strategi serta rasionalisasi.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*

BAB III

PROFIL PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA 06 DAN PENERAPAN DEMOKRASI

A. Pondok Pesantren Miftahul Huda

1. Profil pondok pesantren

Pondok pesantren miftahul huda merupakan salah satu pondok pesantren salafi yang ada di Indonesia. Sebagaimana pondok pesantren salafi yang lainnya, pondok pesantren miftahul huda juga menjadikan kitab kuning atau kitab kuno sebagai objek kajiannya.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 yang beralamat di jl. Rahmat Syatori, no. 92 desa Sukapura, kecamatan Sumberjaya kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang kiyai yang bernama ky. Babussalam Asysya'roni. Pondok pesantren ini merupakan cabang dari pondok pesantren Miftahul Huda yang berada di desa Manonjaya, kecamatan Tasikmalaya, Jawa Barat.

2. Sejarah singkat pondok pesantren

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 didirikan pada tanggal 1 muharam 1420 H yang bertepatan dengan tahun 1999 Masehi. Pada saat didirikan oleh Ky. Babussalam Asysya'roni, pondok pesantren ini hanya memiliki 50 orang santri lokal yang berasal dari sekitar daerah Sukapura, daerah tempat pondok pesantren Miftahul Huda 06 didirikan. Pendirian pondok pesantren ini difasilitasi dengan 12 “kobong” atau kamar yang menjadi tempat tinggal santri. 12 kobong tersebut ada dalam dua gedung, dimana satu gedung merupakan tempat tinggal santri putra dan gedung yang satu lagi merupakan kobong putri. 2 gedung tersebut diberi nama

asrama As-salam yang berisi 6 kobong (kamar) santri putri, dan asrama Ashabul Kahfi yang berisi 6 kobong (kamar) santri putra.

Kemudian seiring bertambahnya santri yang mengaji di pondok pesantren Miftahul Huda 06, pada tahun 2013 dilakukan penambahan kobong. Penambahan tersebut menjadikan asrama As-salam memiliki 15 kobong, dan asrama Ashabul Kahfi memiliki 10 kobong. Selain penambahan kobong, pada tahun tersebut juga dilakukan penambahan asrama, yang menjadikan pondok pesantren miftahul huda memiliki 4 asrama yaitu asrama As-salam dengan 15 kobong, asrama ashabul kahfi dengan 10 kobong, asrama Alawiyatul Huda dengan 15 kobong dan asrama Salman Alfarizi dengan dengan 12 kobong.¹

Saat ini apondok pesantren Miftahul Huda 06 memiliki 397 santri yang terdiri dari 253 santri perempuan 144 santri laki-laki.²

3. Struktur kelembagaan pondok pesantren Miftahul Huda 06

Pimpinan pondok pesantren	: Ky. Babussalam Asysya'roni
Rois	: M. zaini Dahlan
Sekretaris	: Arif Rahman
Bendahara	: Syarif Abdurrohman.
Koordinator pendidikan	: M. Alki Hasan
Kordinator keamanan	: A. rifai
Kordinator asrama As-Salam	: Lili Aliyah
Kordinator asrama alawiyatul huda	: Suci yati
Kordinator asrama Salman Al-Farizi	: Sujana

¹ Dokumen pondok pesantren Miftahul Huda 06, dicatat pada 4 februari 2018

² Dokumen pondok pesantren Miftahul Huda 06, dicatat pada 4 februari 2018

Kordinator asrama Salman Ashabul Kahfi : Al Muqtadir³

4. Visi dan misi pondok pesantren miftahul huda 06

Visi :

menciptakan generasi yang bersikaf ta'muruunabilma'ruuf wa tanhauna 'anilmunkar.

Misi :

a. Mencetak 'Ulama'ul 'Amilin (Ulama yang mengamalkan Ilmu)

Ini merupakan tujuan puncak dan menjadi target dan harapan seluruh pemangku Pesantren Miftahul Huda 06. Namun pondok pesantren menyadari bahwa misi ini tidak mungkin terakbul oleh seluruh para santrinya, oleh karenanya bila tujuan ini tidak kesampaian maka diharapkan misi yang kedua dapat terakbulkan.

b. Mencetak Imamal Muttaqin (Sponsor manusia untuk bertaqwa)

Bahwa siapapun dapat menjadi sponsor yang aktif mendukung dalam menciptakan manusia-manusia yang muttaqin, maka pondok pesantren miftahul huda 06 mengharapka santrinya dapat menjadi pendorong masyarakat untuk bertaqwa kepada Allah, karena tidak semua orang punya kemampuan memimpin dan mengajak orang lain untuk bertaqwa, maka paling tidak lulusan Pesantren Miftahul Huda dapat menghasilkan misi berikutnya.

³ *Ibid*

c. Mencetak pribadi yang Muttaqin.

Diharapkan lulusan Pesantren Miftahul Huda atau bahkan yang tidak lulus pun dapat memiliki bekal ketaqwaan dalam pribadinya⁴

5. Fasilitas pondok pesantren

Fasilitas yang dimiliki oleh pondok pesantren Miftahul Huda 06 untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar di pondok pesantren tersebut adalah sebuah masjid yang bernama masjid Jami' Al-Khairiyah. Masjid ini berada ditengah-tengah pondok pesantren Miftahul Huda 06. Masjid jami' Al-Khairiyah selain digunakan sebagai tempat beribadah santri dan warga masyarakat disekitar pondok pesantren, masjid Jami' Al-Khairiyah juga digunakan sebagai tempat mengaji dan setoran hafalan oleh santri. Masjid Jami' Al-Khairiyah dilengkapi dengan perangkat pendingin ruangan berupa kipas angin dan tempat wudhu serta wc yang digunakan untuk bersuci sebelum memasuki Masjid.

Mobil pick up

Selain masjid, fasilitas yang dimiliki oleh pondok pesantren Miftahul Huda 06 adalah 1 unit mobil pick-up. Mobil ini digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengangkut bahan makanan yang akan dimasak dan dikonsumsi oleh santriwan dan santriwati Miftahul Huda 06. Selain untuk kepentingan pokok tersebut, mobil ini juga disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan, dimana hasil sewa ini dimasukkan sebagai tambahan kas pondok pesantren yang kelak akan digunakan sebagai dana operasional pondok pesantren.

⁴ Dokumen pondok pesantren Miftahul Huda 06.

Depot air minum isi ulang

Depot air minum juga menjadi salah satu fasilitas dan media penambah uang kas pondok pesantren. Depot air minum ini digunakan sebagai sumber air minum bagi para santri secara gratis, namun jika masyarakat sekitar yang menggunakan akan dikenakan biaya sebesar 3000 rupiah setiap satu galon airnya. Menurut pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda, depot air minum ini didirikan dengan dana kas pesantren. Depot air minum dijadikan sebagai pilihan pemanfaatan dana pesantren karena memiliki peluang berkembang yang cukup bagus. Dimana daerah Sukapura yang menjadi tempat berdirinya pondok pesantren Miftahul Huda 06 masih sangat jarang orang yang memiliki usaha depot air minum. Pada saat didirikan depot air minum di pondok pesantren Miftahul Huda hingga saat penulis melakukan penelitian, hanya terdapat 2 depot air minum. Sedangkan kebutuhan air minum merupakan kebutuhan yang tidak pernah terhenti, sehingga pemanfaatan dana kas pesantren kepada usaha depot air minum merupakan pemanfaatan usaha yang cukup menjanjikan bagi pondok pesantren, selain bernilai ekonomi, depot air minum juga dapat menunjang kebutuhan air minum bagi para santri di pondok pesantren Miftahul Huda 06.

Koperasi santri

Para santri dan ustadz yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda 06 adalah manusia biasa yang asih memerlukan kebutuhan ekonomi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai solusi perekonomian sehari-hari santri dan ustadz, pondok pesantren Miftahul Huda 06 mendirikan sebuah koperasi yang anggotanya khusus santri dan ustadz di pondok pesantren Miftahul Huda saja. Para santri yang

ikut tergabung dalam koperasi ini dapat menyimpan dan meminjam uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Menurut ustadz hadi, salah seorang santri senior yang juga diperbantukan untuk mengajar fiqih dipondok pesantren Miftahul Huda 06, keberadaan koperasi ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan yang terkadang mendadak, kebutuhan untuk pengobatan misalnya. Beliau mengemukakan bahwa:

”koperasi yang ada dipondok pesantren Miftahul Huda ini sangat membantu sekali, terlebih pada saat-saat kita memiliki keperluan mendadak, seperti misalkan saya sekitar bulan agustus 2017 mengalami kecelakaan, kaki kanan saya patah waktu itu, maka saya mengajukan pinjaman ke koperasi untuk biaya pengobatan dan juga biaya hidup selama saya belum bisa bekerja normal kembali.”⁵

Begitu ungkap ustadz hadi yang selain santri dan ustadz, beliau juga biasa berprofesi sebagai tukang bangunan dan pekerja harian lepas.

Perpustakaan

Sebagaimana pondok pesantren salafi pada umumnya, pondok pesantren Miftahul Huda 06 juga melarang para santri untuk membawa alat komunikasi seperti handphone, baik handphone biasa ataupun ponsel pintar yang dikenal dengan sebutan android. Hal ini dilakukan bukan dimaksudkan untuk melarang santri mengenal teknologi ataupun keadaan terkini dunia. Tetapi larangan membawa handphone dilakukan agar para santri lebih sering mengisi kegiatan mereka dengan membaca kitab-kitab para ulama terdahulu dan al-qur'an daripada hanya menyibukkan diri dengan menggunakan ponsel. Sebagai sarana mendukung kebiasaan membaca para santri, pondok pesantren Miftahul Huda 06 menyediakan perpustakaan yang memiliki koleksi buku-buku dan kitab dari para ulama

⁵ Ustd Hadi, pengajar di pondok pesantren Miftahul Huda 06, wawancara tgl 4 februari 2018

terdahulu. Kitab yang ada di perpustakaan ini tidak hanya sebatas kitab-kitab terjemahan, ada juga beberapa kitab berbahasa arab seperti Fathul Bari yang ditulis oleh Al-hafidz Ibnu hajar Al-Asqalani. Perpustakaan ini dijaga oleh seorang petugas perpustakaan bernama rizki hamid. Para santri dan ustadz dapat meminjam dan membaca buku ataupun kitab di perpustakaan ini dengan menggunakan kartu perpustakaan yang telah dibuat pada saat para santri mendaftar dan diterima di pondok pesantren Miftahul Huda 06.

Klinik kesehatan

Kesehatan adalah satu aspek kehidupan yang sangat penting, bahkan ada pepatah mengatakan bahwa uang tidak akan ada artinya jika pemiliknya mengidap penyakit. Hal ini terjadi karena setiap orang akan rela mengeluarkan kekayaan yang dimiliki hanya untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Yang menarik adalah tidak ada seorangpun di dunia yang sepanjang hidupnya tidak mengalami sakit. Hal ini menjadikan fasilitas kesehatan sebagai sarana yang sangat penting dalam sebuah kelompok masyarakat.

Pondok pesantren Miftahul Huda sebagai sebuah tempat yang didiami oleh sekelompok santri dan ustadz, sangat menyadari akan pentingnya fasilitas kesehatan tersebut. Karena itu, pada tahun 2010 pondok pesantren Miftahul Huda 06 membangun sebuah gedung yang difungsikan sebagai klinik kesehatan. Klinik ini memiliki 1 orang tenaga medis yang merupakan alumni dari pondok pesantren Miftahul Huda pusat yang berada di Manonjaya, Tasikmalaya.

Klinik kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 dapat digunakan oleh santri dan ustadz untuk pengobatan dengan membayar obatnya

saja, sedangkan jasa tenaga kesehatan dan konsultasi kesehatan dapat dinikmati oleh santri dan ustadz pondok pesantren Miftahul Huda 06 secara gratis.⁶

Klinik kesehatan Miftahul Huda 06 dapat digunakan oleh masyarakat sekitar pondok pesantren Miftahul Huda 06, namun apabila yang menggunakan bukan santri dan ustadz pondok pesantren Miftahul Huda 06, maka akan dikenakan biaya administrasi sebagaimana mestinya.

6. Kegiatan rutin pondok pesantren

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 sebagai wadah pendidikan keagamaan bagi santri memiliki beberapa kegiatan rutin, baik kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk santri dan alumninya maupun kegiatan yang dibuka umum sehingga warga sekitar dapat mengikuti kegiatan tersebut dan merasakan manfaat dari kehadiran pondok pesantren ditengah-tengah masyarakat.

Kegiatan rutin yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda 06 adalah sebagai berikut:

a. Reuni akbar tahunan

Pondok pesantren adalah wadah untuk mencetak masyarakat yang mampu menjadi pencerah dimana tempat dia berada dan mengabdikan kelak. Sehingga walaupun mereka sudah menjadi alumni, mereka tetap diberikan pengingat bahwa mereka adalah warga pondok pesantren dan harus berbuat sesuai dengan apa yang dipelajari di pondok pesantren Miftahul Huda 06.

⁶ Miftahul Khairiyah, tenaga medis Pondok pesantren Miftahul Huda 06, wawancara 5 februari 2018

Reuni akbar dijadikan sebagai salah satu acara rutin setiap tahunnya dengan rangkaian acara berupa penampilan solawat dari adik-adik santri yang masih belajar di pondok pesantren Miftahul Huda 06, kemudian sambutan-sambutan baik dari pihak pondok pesantren, aparat pemerintah setempat, maupun sambutan dari perwakilan alumni, acara reuni akbar ini kemudian diisi juga dengan tausiyah dari penceramah yang didatangkan dari daerah lain atau terkadang diisi oleh kiyai Babussalam Asysya'roni selaku pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda 06 sendiri. reuni akbar ini diadakan dipondok pesantren Miftahul Huda 06 setiap satu tahun sekali, dengan harapan para alumni tetap akan terjaga rasa persaudaraan, rasa cinta terhadap pondok pesantren, serta tetap menyadari bahwa dirinya adalah alumni pondok pesantren, sehingga untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama merangkap merasa malu.

b. Pengajian mingguan

Sebagai Pondok pesantren yang hidup ditengah-tengah perumahan penduduk, maka kegiatan keislaman bukan saja hanya diberikan kepada para santri, tetapi juga kepada penduduk sekitar pondok pesantren Miftahul Huda 06, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat sekitar pondok pesantren juga ikut merasakan manfaat dari berdirinya pondok pesantren Miftahul Huda 06 ditengah-tengah mereka. Pengajian mingguan ini dilaksanakan di dua waktu, yaitu bakda shalat jum'at untuk pengajian bapak-bapak sedangkan ba'da zuhur hari rabu untuk pengajian ibu-ibu.

“kegiatan pengajian ini diadakan sebagai bentuk kepedulian pondok pesantren kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, jadi hadirnya pondok pesantren ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar pondok pesantren. Sebenarnya selain diwaktu pengajian, masyarakat banyak juga yang

hadir ke pondok pesantren Miftahul Huda 06 untuk meminta nasehat, pendapat, menyampaikan ide, atau hanya sekedar bercerita mengeluarkan keluh kesahnya saja”⁷

c. Pawai muharam

Awal tahun hijriah dijadikan sebuah momen yang diperingati oleh pondok pesantren Miftahul Huda 06. Peringatan ini dilakukan oleh pondok pesantren Miftahul Huda dengan cara melakukan pawai keliling dengan rute keliling desa Sukapura. Peserta dari kegiatan pawai ini adalah santri dan anak-anak sekitar pondok pesantren Miftahul Huda. Menurut M. Zaini Dahlan, ketua santri pondok pesantren Miftahul Huda, acara pawai ini dimaksudkan agar terjadi silaturahmi antara warga pondok pesantren dan warga masyarakat sekitar.⁸

Acara pawai muharam ini dilakukan dengan cara mengenakan pakaian-pakaian tradisional, baik pakaian ulama, pakaian pahlawan, atau pakaian tradisional daerah. Setelah melakukan pawai keliling, sambil istirahat dilapangan, peserta dan warga masyarakat akan disuguhi penampilan-penampilan dari para santri pondok pesantren Miftahul Huda 06.

d. Pelatihan menjahit

Pondok pesantren merupakan wadah untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki iman dan takwa, lulusan yang dihasilkan dari proses pendidikan di pondok pesantren merupakan orang-orang yang mampu menjadi pencerah ditempat mereka tinggal kelak. Berbeda dari sekolah formal yang menjanjikan ijazah dan pengetahuan untuk menambah daya saing didunia kerja,

⁷ Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

⁸ M. Zaini Dahlan, Rois Ponpes Miftahul Huda 06, Wawancara 04 Februari 2018

pondok pesantren justru menjanjikan kemantapan ilmu dan jiwa yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan pencerahan ummat. Pemahaman inilah yang menjadikan masyarakat umumnya memiliki pandangan bahwa pondok pesantren hanya akan menghasilkan guru ngaji, pengurus masjid, pemimpin doa diwaktu hajatan, pembaca talqin saat proses pemakaman dan pembaca khutbah saat sholat jum'at. Sedangkan untuk bekal kehidupan, alumni pondok pesantren hanya akan mengharapkan dari kerja keras menjadi petani.

Menghadapi permasalahan tersebut, pondok pesantren Miftahul Huda memberikan kegiatan yang dapat meningkatkan lifeskill para santri sehingga pada saat mereka berada ditengah-tengah masyarakat, mereka sudah memiliki keahlian yang diharapkan dapat membantu menopang kehidupan mereka sehari-hari. Pelatihan menjahit merupakan kegiatan yang dipilih untuk menambah lifeskill para santri. Para santri dilatih menjahit oleh M Rasyid salah seorang ustadz dipondok pesantren Miftahul Huda yang juga berprofesi sebagai penjahit pakaian di desa Sukapura, kecamatan Sumberjaya kabupaten Lampung Barat

Menjahit dipilih sebagai bekal keahlian santri karena menjahit merupakan profesi yang tidak akan berhenti karena perubahan zaman, kebutuhan akan pakaian akan selalu ada disetiap perkembangan zaman, sehingga menjahit tidak akan kehilangan konsumen walaupun berada dizaman dan tempat yang berbeda. Selain itu profesi sebagai penjahit adalah pekerjaan yang dapat dilakukan dirumah. Dengan kata lain seseorang yang memiliki keahlian menjahit akan mampu

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tanpa harus menjadi pelamar kerja diberbagai perusahaan dan kemudian bekerja dibawah tekanan atasan.⁹

Pelatihan menjahit dilakukan setiap hari minggu pukul 09 pagi hingga menjelang zuhur. Menurut Muhammad Rasyid, Pembina kegiatan belajar menjahit dipondok pesantren Miftahul Huda 06, hari minggu dipilih sebagai waktu untuk melaksanakan kegiatan belajar menjahit karena pada hari tersebut, santri yang masih mengikuti pendidikan formal seperti SMP dan SMA memiliki waktu luang sebab mereka libur sekolah, sehingga kegiatan belajar menjahit dapat dilakukan tanpa mengganggu kegiatan belajar mereka di pendidikan formal. peserta pelatihan menjahit adalah para santri yang berminat menekuni atau memiliki keahlian menjahit. Pada saat ini, santri yang mengikuti pelatihan menjahit berjumlah 127 orang, yang terdiri dari 89 santriwati dan 38 orang santriwan atau santri laki-laki.¹⁰

B. Nilai-Nilai Demokrasi Di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 sebagai wadah mengelola santri menjadi muslim yang berakhlak, yang siap menjadi pencerah dimanapun tempat dia berada kelak, tentu memiliki nilai-nilai yang diterapkannya didalam pondok pesantren Miftahul Huda 06. Nilai-nilai ini diterapkan dipondok pesantren Miftahul Huda 06 agar proses pembelajaran yang ada di pondok pesantren ini berjalan dengan lancar dan tidak menemui halangan yang berarti, sehingga apa yang menjadi visi dan misi pondok pesantren Miftahul Huda 06 dapat benar-benar terwujud.

⁹M. Zaini Dahlan, Rois Ponpes Miftahul Huda 06, Wawancara 04 Februari 2018

¹⁰M. Rasyid, pembina kegiatan menjahit dipondok pesantren Miftahul Huda 06, wawancara 5 februari 2018

Nilai-nilai islam sudah pasti merupakan nilai yang sangat diperhatikan dan diterapkan di pondok pesantren Miftahul Huda 06, disamping itu pondok pesantren Miftahul Huda 06 juga menerapkan beberapa prinsip nilai demokrasi untuk menunjang kemudahan program pembelajaran di pondok pesantren Miftahul Huda 06. Beberapa nilai demokrasi yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda 06 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kebebasan kepada santri untuk memilih ustadz

Sebagaimana pondok pesantren salafi pada umumnya, pondok pesantren Miftahul Huda 06 juga mengajarkan pendidikan kitab-kitab fiqih, ulumul quran dsb. Namun pondok pesantren Miftahul Huda 06 memiliki perhatian khusus kepada kenyamanan belajar santri. Pondok pesantren Miftahul Huda 06 menyediakan setidaknya 2 orang ustadz yang dapat dipilih salah satunya oleh para santri untuk menjadi guru Pembina mereka dalam mata pelajaran tertentu. Ky. Babussalam Asysya'roni selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda 06 menjelaskan:

“Pondok pesantren Miftahul Huda merupakan tipe pesantren salaf. Namun untuk kenyamanan dalam belajar, pondok pesantren memberikan pilihan ustadz kepada para santri untuk mengajar mereka dalam mata pelajaran tertentu. Setidaknya ada 2 orang ustadz dari setiap mata pelajaran yang dapat mereka pilih untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda”.¹¹

¹¹ Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

Dilihat dari kebebasan memilih ustadz yang diberikan oleh pondok pesantren Miftahul Huda ini, maka dapat dikatakan bahwa pondok pesantren miftahul Huda menginginkan para santri untuk memiliki kenyamanan dalam belajar, serta memiliki keberanian untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, serta terciptanya komunikasi dua arah antara pondok pesantren-santri dan santri-pondok pesantren.

2. Mewajibkan ustadz untuk memberikan kesempatan yang sama kepada santri dalam hal kegiatan belajar mengajar

Pembelajaran yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda 06 dibina oleh satu orang ustadz/ustadzah disetiap kelasnya. Setiap ustadz yang mengajar benar-benar diingatkan bahwa proses penanaman ilmu pengetahuan yang objeknya adalah para santri. Sebagai objek, para santri harus benar-benar di prioritaskan. Ky Babussalam Asysya'roni menyadari bahwa keterpaksaan dan ketertekanan bukanlah keadaan yang baik untuk menerima pengetahuan. Selain itu santri adalah orang yang berasal dari keluarga yang berbeda, bahkan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Karena itu sangat pasti bahwa setiap santri memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda.

Dari perbedaan tersebut, kegiatan belajar mengajar dapat menjadi ajang perlombaan sehingga para santri mendapatkan dorongan semangat untuk lebih giat belajar. Semangat yang sudah dimiliki oleh para santri ini harus benar-benar dijaga oleh para ustadz, jangan sampai semangat tersebut justru berubah menjadi keputus asa'an yang berujung pada gagalnya proses belajar ilmu agama di pondok pesantren Miftahul Huda 06. Sebagai upaya untuk menjaga semangat tersebut,

maka ustadz yang mengajar dipondok pesantren Miftahu Huda 06 ditekankan agar selalu memberikan kesempatan yang sama kepada para santri dalam proses belajar tersebut. Santri diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai apa yang mereka belum fahami serta diberikan kesempatan untuk menyatakan apa pendapat mereka berdasarkan apa yang sudah mereka fahami. Sebagai bentuk upaya ini, setiap mata pelajaran akan diberikan satu kesempatan diskusi mengenai sebuah permasalahan yang terkait dengan mata pelajaran tersebut. Dalam diskusi ini para santri diberikan waktu untuk membahas sebuah permasalahan berdasarkan apa yang mereka sudah fahami. Dari diskusi ini, selain diasah kemampuan mengekspresikan pendapat, santri juga diajarkan untuk berfikir kreatif namun tetap berlandasan. Salah seorang ustadz pondok pesantren Miftahul Huda 06, yakni H. M.Syukron Djazilan Badri mengemukakan bahwa:

“pendidikan tidak dipandang sebagai proses pemaksaan dari seseorang pendidik untuk menentukan setiap langkah yang harus diterima oleh peserta didiknya secara individual” dengan demikian dalam proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan. Sebab

semua itu pasti akan menghambat terserapnya ilmu pengetahuan yang mereka pelajari.”¹²

Dari pendapat ustadz tersebut, terlihat bahwa pondok pesantren Miftahul Huda benar-benar menyadari bahwa Islam menyerukan adanya prinsip persamaan dan peluang yang sama dalam belajar sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik, serta tidak pula gender dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik

3. Berupaya memaksimalkan minat dan bakat santri

Dalam system pemerintahan demokrasi, yang menjadi objek dan tujuan utama sebuah program adalah masyarakat. Hal ini senada dengan pengertian demokrasi sebagai sebuah system yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pondok pesantren, yang menjadi pemerintah adalah pengelola pondok pesantren beserta jajarannya, sedangkan yang menjadi rakyat adalah para santri. Sehingga kegiatan dan program yang ada di pondok pesantren akan menjadikan santri sebagai objek kemajuannya.

Kemajuan santri dapat dilihat dari terasahnya keahlian yang dimiliki oleh santri sebagai penunjang kehidupan mereka sehari-hari, tentu saja hal ini tidak dapat menggantikan posisi pengetahuan dan pengamalan agama sebagai pokok ajaran, namun keahlian yang lain adalah sebuah pendukung dari pengetahuan keagamaan tersebut.

¹² H. M.Syukron Djazilan Badri, ustadz pondok pesantren Miftahul Huda 06, wawancara 5 februari 2018

Sebagai bentuk perhatiannya terhadap minat dan bakat para santri, pondok pesantren Miftahul Huda 06 berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengembangkan potensi dari para santri. Misalkan pada tahun 2017, menurut pengakuan Ky. Babussalam Asysya'roni selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda 06, ada salah seorang santri bernama Mustofa Hamidin yang memiliki bakat dalam seni baca al-qur'an, maka pondok pesantren mendaftarkan santri tersebut untuk mengikuti MTQ tingkat kabupaten di kota Liwa, yang kemudian akan diteruskan ke ajang MTQ tingkat provinsi, namun walaupun pelatihan dan dukungan dari pondok pesantren sudah sangat maksimal, Mustofa Hamidin hanya mendapatkan posisi ke 23 kategori qiraat murotal remaja tingkat kabupaten, sehingga Mustofa Hamidin tidak dapat melanjutkan ke perlombaan MTQ tingkat provinsi.¹³

4. Menyediakan mading sebagai media penyalur aspirasi santri

Demokrasi adalah sebuah system pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak bagi masyarakat dibawah pemerintahannya. Pemerintahan demokrasi sangat menghargai setiap pendapat atau aspirasi masyarakatnya. Masyarakat yang berada dibawah naungan pemerintahan demokrasi tidak akan dikekang untuk mengikuti keputusan pemerintah tanpa mendapatkan kesempatan mengeluarkan pendapatnya.

Salah satu nilai demokrasi yang diterapkan dipondok peantren Miftahul Huda 06 adalah nilai kebebasan berpendapat yang dapat dilihat dari tersedianya majalah dinding (mading) sebagai sarana bagi para santri untuk mengeluarkan

¹³Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

aspirasinya, baik itu saran maupun kritik dan harapan kepada pengelola pondok pesantren maupun para santri yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda 06. Majalah dinding ini diletakkan di masjid Jami' Al-Khairiyah yang merupakan masjid ditengah-tengah pondok pesantren Miftahul Huda 06. Menurut M. Zaini Dahlan, Rois pondok pesantren Miftahul Huda 06, diletakkannya madding di masjid ini karena masjid merupakan tempat yang pasti dikunjungi oleh setiap santri, ustadz, maupun pihak pengelola pondok pesantren. Sehingga apabila ada seseorang yang memasang tulisan di majalah dinding tersebut, pasti akan dapat dilihat oleh semua orang yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda.¹⁴

Majalah dinding yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda ini dikelola oleh sejumlah santri yang berada dibawah naungan rois, setiap orang yang ingin memasang tulisannya di madding tersebut, harus menyerahkan tulisannya kepada rois, yang kemudian di musyawarahkan oleh pengelola majalah dinding mengenai kelayakan tulisan tersebut dimuat di majalah dinding pondok pesantren Miftahul Huda 06.¹⁵

5. Menerapkan system pengelolaan pondok pesantren perwakilan kiyai.

Dalam sebuah demokrasi, persaingan merupakan suatu hal yang wajar sebagai dampak dari perbedaan pendapat. Namun dari beberapa pendapat yang berbeda tersebut, demokrasi menginginkan tujuan yang bias disikapi dengan kerjasama yang baik dan berkualitas. Kompetisi menuju hal yang baik mutlak diperlukan, namun disisi lain upaya untuk menuju kearah yang lebih baik tersebut memerlukan kerjasama yang maksimal dari semua pihak yang bersangkutan.

¹⁴ M. Zaini Dahlan, Rois Ponpes Miftahul Huda 06, Wawancara 04 Februari 2018

¹⁵ M. Alqi Hasan, kordinator mading ponpes Miftahul Huda 06, Wawancara 04 Februari 2018

Kyai sebagai tokoh sentral pondok pesantren memiliki power dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pondok pesantren, namun ky. Babussalam Asysya'roni, menyadari bahwa kerjasama sangatlah diperlukan dalam mengelola pondok pesantren tersebut, sebagai upaya dalam mewujudkan kerjasama tersebut, ky. Babussalam Asysya'roni membentuk kepengurusan pondok pesantren yang diberi tugas dan wewenang khusus dalam bidangnya masing-masing. Misalkan dalam bidang keamanan, ky. Babussalam Asysya'roni memiliki Ahmad Rifai sebagai kordinator keamanan, koordinator keamanan ini bertugas untuk menjaga keamanan para santri dan juga keamanan pondok pesantren Miftahul Huda dari ancaman luar.¹⁶

Pembentukan struktur keorganisasian ini ditujukan agar terciptanya kerjasama antar semua civitas pondok pesantren dalam memperlancar kegiatan pondok pesantren guna tercapainya visi dan misi pondok pesantren Miftahul Huda. Penentuan orang yang akan mengisi posisi-posisi sebagai wakil kiyai ini dilakukan dengan pemilihan langsung oleh para santri. Mekanismenya adalah penunjukan calon yang dilakukan langsung oleh ky. Babussalam Asysya'roni, kemudian calon tersebut dikenalkan kepada santri dan santri akan melakukan pemilihan langsung sebagai penentu pemenang yang akan mengisi posisi tersebut. Cara pemilihan ini telah berlangsung sejak dari pondok pesantren Miftahul Huda 06 berdiri.¹⁷

¹⁶ Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

¹⁷ Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

6. Menerapkan gotong royong dalam mengelola konsumsi.

Sebagai pondok pesantren salafi, maka konsumsi untuk santri dilakukan secara bergotong royong dengan giliran piket, dimana santri laki-laki bertugas untuk memasak nasi, sedangkan santri perempuan bertugas untuk memasak sayur. Makanan yang telah selesai dimasak kemudian dikemas dan didistribusikan kepada santri melalui kantin yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda 06. Pada pembeagia jadwal piket, rois tau ketua pondok akan membagi secara merata santri dalam bagian yang seadil-adilnya. Santri yang masih kecil akan dibagi secara merata disetiap kelompoknya agar tidak terjadi piket dalam satu hari hanya dilakukan oleh santri-santri junior saja.

Dana untuk konsumsi santri sudah termasuk kedalam spp santri selama satu tahun yaitu sebesar 3,5 juta rupiah, termasuk didalamnya, dana kobong, listrik konsumsi, dsb.

C. Penerapan demokrasi pada pemilukada 2017 di pondok pesantren Miftahul Huda 06

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) merupakan salah satu kegiatan rutin pada Negara yang menganut system pemerintahan demokrasi. Pemilihan umum ini dilakukan secara langsung di tempat pemungutan suara atau TPS. Pemberian suara oleh rakyat dilakukan dengan mepasanagan calon kepala dareah yang akan memimpin mereka pada pemerintahan 5 tahun kedepan.

Tahun 2017 kabupaten Lampung Barat melaksanakan pesta demokrasi atau pemilihan umum untuk menentukan pemimpin kabupaten (bupati) yang akan memimpin Lampung Barat priode 2017-2022. Pada pemilu 2017 tersebut terdapat

2 pasang calon bupati yaitu pasangan H. Parosil Mabsus, S.Pd – Drs. H. Mad Hasnurin, dan pasangan Dr. H. Edy Irawan Arief, S.E., M.Ec – H. Ulul Azmi Soltiansyah, S.H.

Pesta demokrasi atau pemilihan umum memiliki sebuah kegiatan berupa kampanye yang merupakan peluang bagi pasangan calon kepala daerah untuk menyampaikan visi dan misinya apabila mereka terpilih menjadi kepala daerah. Kampanye dapat dilakukan disemua tempat didaerah yang bersangkutan kecuali tempat ibadah dan tempat pendidikan.¹⁸

Pondok pesantren Miftahul Huda 06, sebagai salah satu unsur masyarakat Lampung Barat memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya terkait pemilihan kepala daerah yang akan memimpin Lampung Barat priode 2017-2022. Sebagai sebuah tempat pendidikan bagi para santri, pondok pesantren Miftahul Huda memang tidak disentuh oleh pasangan calon kepala daerah Lampung Barat pada saat masa kampanye. Namun karena pentingnya pemimpin atau kepala daerah, pondok pesantren Miftahul Huda 06 sangat memperhatikan keberlangsungan pilukada 2017 tersebut.¹⁹

Berikut beberapa upaya penerapan demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06 pada pilukada 2017 kabupaten Lampung Barat:

1. Mengingatkan kepada para santri bahwa pemberian suara bukan hal yang sepele, namun akan menentukan laju kepemimpinan 5 tahun kedepan

¹⁸ UUD no 10 tahun 2016

¹⁹ Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

Pemberian suara secara langsung merupakan salah satu ciri pemerintahan demokrasi dalam segi penentuan kepemimpinan. Pemberian suara ini merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, tanpa mempermasalahkan apa yang menjadi profesi mereka, petani, pegawai negeri, pengangguran, pun begitu dengan ustadz ataupun santri. Apabila mereka sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, maka mereka berhak untuk menyuarakan pilihan mereka pada acara pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Ky. Babussalam Asysya'roni selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda 06 mengemukakan bahwa dalam menghadapi pemilukada 2017, beliau memberikan keleluasaan kepada seluruh santri untuk mengikuti pemilihan umum tersebut. Namun dibalik kebebasan tersebut beliau tetap mengingatkan bahwa satu suara yang diberikan pada pemilu akan menentukan kepemimpinan 5 tahun kedepan dan tentu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebab dengan memilih, berarti mereka sedang bersaksi bahwa pilihannya layak untuk memimpin Lampung Barat pada tahun 2017 hingga tahun 2022.

“saya sendiri selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan menjelang pemilu tahun 2017 bahwa para santri juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menyuarakan pilihannya pada acara pemilihan umum tersebut, jadi mereka memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Namun tetap saya pribadi mengingatkan bahwa pada saat mereka menentukan pilihan waktu pencoblosan, maka mereka saat itu sedang bersaksi kepada Allah bahwa pilihannya tersebut layak untuk menjadi pemimpin Lampung Barat 5 tahun kedepan maka mereka perlu benar-benar berhati-hati dalam menentukan pilihan, perhatikan baik-baik siapa yang akan mereka pilih tersebut.” Begitu ungkap ky. Babussalam Asysya'roni.²⁰

2. Memberikan bantuan tenaga pada acara pemungutan suara

²⁰ Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

Acara pemungutan suara merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pemilihan umum. Sebab pada kegiatan ini suara dari para pemilih akan diperhitungkan dan hasilnya akan menentukan siapa yang akan memimpin Lampung Barat. Banyak sekali peluang terjadinya kecurangan dalam melakukan pemungutan suara, mulai dari penggandaan surat suara, hingga kepada pemalsuan hasil perhitungan suara. Kecurangan-kecurangan dalam proses pemungutan suara tersebut tentulah sangat tidak diinginkan oleh masyarakat sebagai pemberi suara.

Begitu pentingnya acara pemungutan suara membuat diperlukannya para pekerja yang bertugas menjaga keberlangsungan pemungutan suara agar berjalan dengan sebagaimana mestinya, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Pondok pesantren Miftahul Huda 06, sebagai salah satu unsure lapisan masyarakat tentu sangat mendukung keberlangsungan proses pemungutan suara ini, bahkan ada 2 orang ustadz yang ikut berpartisipasi menjadi panitia pemungutan suara di tempat pemungutan suara desa Sukapura, kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat, yaitu ustadz Abdul Hadi Al-Ghifari yang pada saat pemilu bertugas sebagai pemberi surat suara kepada para pemilih, dan ustadz Wawan Saefullah yang bertugas menjaga tinta bukti pemilih telah memberikan suaranya.²¹ Berpartisipasinya ustadz pondok pesantren Miftahul Huda 06 dalam kegiatan pemungutan suara ini diharapkan dapat membantu memperlancar kegiatan pemungutan suara serta mengurangi peluang terjadinya kecurangan pemungutan suara yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

²¹ Dokumen pemerintahan desa Sukapura, dicatat pada 6 februari 2018

3. Mengizinkan para santri dan ustadz untuk menghadiri pertemuan kampanye pasangan calon bupati di desa Sukapura.

Kampanye merupakan waktu bagi para calon kepala daerah untuk memperkenalkan diri serta visi dan misinya apabila terpilih menjadi pemimpin pada pesta demokrasi yaitu pemilihan umum. Pada saat kampanye juga akan dinilai oleh komisi pemilihan umum mengenai keseriusan dan ketaatan calon dalam melakukan kampanye. Apabila pada saat kampanye ada calon kepala daerah yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pemilihan umum, maka calon tersebut dapat dibatalkan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai waktu bagi para calon untuk memperkenalkan diri, masa kampanye menjadi masa yang sangat menarik bagi masyarakat, mereka dapat mengenal lebih dekat siapa calon pemimpin mereka, bahkan ada yang menjadikan masa kampanye sebagai waktu penggalan dana bagi kepentingan umum, misalnya meminta dibelikan bantuan alat-alat marawis untuk ibu-ibu PKK, meminta dibelikan bola voli untuk pemuda, bantuan pembangunan masjid, dsb. Hal tersebut sah-sah saja sepanjang dana yang dihasilkan memang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Disisi lain, masa kampanye menjadi masa untuk melakukan pelanggaran aturan pemilihan umum, misalnya melakukan money politik dengan membagikan uang perkepala dan membuat perjanjian bahwa akan memilih calon tertentu. Pelanggaran ini memang sangat diterima oleh masyarakat yang belum memiliki pengetahuan akan makna pemilihan umum. Mereka berfikir yang penting bias

mencukupi kebutuhan saat itu sudah cukup. Masalah bagaimana keberlangsungan pemerintahan 5 tahun kedepan tidklah menjadi permasalahan.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 memiliki santri dan ustadz yang berhak mengikuti pemilihan umum di Lampung Barat sejumlah 209 orang ini memberikan pengarahan kepada para santri dan ustadz tersebut untuk mengikuti pertemuan kampanye didesa sukapura. Tujuannya adalah agar mereka mengenal lebih dekat lagi siapa calon yang akan mereka pilih pada pemilu pada 2017 tersebut.²²

4. Memanfaatkan Mading sebagai media peringatan pemilu yang jujur dan adil.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 memiliki Mading sebagai sarana penyalur aspirasi bagi para santri kepada pondok pesantren maupun kepada jajaran kepengurusan pondok pesantren. Pada hari-hari biasanya, madding ini dimanfaatkan sebagai sarana berekspresi diri, baik menampilkan hasil karya tulisan berupa kritik dan saran, pengumuman, maupun hasil karya berupa sastra ataupun karya tulis lain dari para santri Miftahul Huda 06.

Menjelang pemilu 2017, pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda 06 sendiri ikut menulis dan memasang tulisannya pada madding tersebut. Tulisan dari kiyai ini berisi tentang makna pemilihan umum, saran terhadap calon pemilih dan peringatan akan hukum dari money politik atau pembelian suara dalam pandangan islam. Ky Babussalam Asysya'roni selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda 06 mengharapkan bahwa tulisannya tersebut dapat berpengaruh

²²Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

terhadap suksesnya pemilihan umum 2017 khususnya para pemilih yang berasal dari pondok pesantren Miftahul Huda 06.²³

²³ Ky Babussalam Asysya'roni, pengasuh ponpes Miftahul Huda, wawancara 5 februari 2018

BAB IV
IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL
HUDA 06 PADA PEMILUKADA TAHUN 2017 KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

A. Implementasi demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06 pada pilukada tahun 2017 kabupaten Lampung Barat

Sebagai Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkala melakukan pergantian kepemimpinan dengan cara melakukan pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu. Pergantian pemimpin secara berkala ini diharapkan dapat menjadikan pemerintahan di Negara Republik Indonesia selalu memiliki semangat yang baru, sebab pemikiran dan strategi kepemimpinan selalu diperbarui seiring dengan diperbarunya orang-orang yang menduduki kursi kepemimpinan di negara Republik Indonesia. Pergantian kepemimpinan secara berkala ini tidak hanya dilakukan pada kepemimpinan pusat atau kepresidenan saja, namun juga dilakukan terhadap jajaran pemerintahan dibawah presiden, baik itu gubernur, bupati hingga pemerintah yang mengurus kepemimpinan desa atau kelurahan yang dikenal dengan sebutan kepala desa atau lurah.

Pondok pesantren merupakan lembaga sosial yang diharapkan dapat berperan sebagai tempat yang menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan sosial. misalkan Pesantren atau orang yang mewakili, seperti kyai, ustadz, atau santri senior yang disibukkan dengan adanya para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka

adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat, “doa” berobat, dan minta semacam jimat untuk menangkal gangguan. Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumah tangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu pesantren nampak menjadi sumber solusi, dan acuan dinamis masyarakat juga sebagai lembaga inspirato (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat. Sehingga keberadaan pondok pesantren dapat dikatakan sebagai imam masyarakat, dimana beberapa permasalahan yang apabila telah dianjurkan atau dilakukan sendiri oleh fihak pondok pesantren, maka lingkungan masyarakat akan ikut beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal baik yang perlu dan patut untuk dilakukan.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 sangat menyadari akan fungsinya sebagai lembaga sosial ini, bahkan pondok pesantren Miftahul Huda 06 telah meluangkan waktu khusus untuk menjalankan fungsi ini dan melayani permasalahan masyarakat sekitar pondok pesantren Miftahul Huda 06 dengan mengadakan pengajian mingguan yang dibuka untuk umum, sehingga masyarakat sekitar pondok pesantren yang ingin bersilaturahmi atau berdiskusi dengan fihak pondok pesantren dapat langsung bertanya dan berdiskusi pada kegiatan pengajian ini.

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda 06, ky. Babussalam Asysya'roni.

“kegiatan pengajian ini diadakan sebagai bentuk kepedulian pondok pesantren kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, jadi hadirnya pondok pesantren ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar pondok pesantren. Sebenarnya selain diwaktu pengajian, masyarakat banyak juga yang hadir ke pondok pesantren Miftahul Huda 06 untuk meminta nasehat, pendapat, menyampaikan ide, atau hanya sekedar bercerita mengeluarkan keluh kesahnya saja”

Berfungsinya pondok pesantren Miftahul Huda 06 sebagai lembaga sosial di desa Sukapura kecamatan Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat ini memiliki dampak tersendiri terhadap peran pondok pesantren dalam berbagai bidang sosial di masyarakat, mulai dari sosial keagamaan dengan perannya yang menjadi tolak ukur permasalahan keagamaan masyarakat sekitar, sampai kepada peran sebagai lembaga sosial politik yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik di desa Sukapura kecamatan Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa pemerintahan yang menganut system demokrasi akan selalu memperbarui orang-orang yang mengisi kepemimpinan daerahnya secara berkala dengan menggunakan pemilihan umum sebagai penentunya. Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu jajaran pemerintahan yang ada di Negara Demokrasi Republik Indonesia pada tahun 2017 juga mengadakan regenerasi atau pembaruan kepemimpinan dengan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia. pada pemilu tahun 2017, ada dua pasangan calon bupati yang mengikuti pemilihan umum tersebut. Dalam melaksanakan peta demokrasi atau pemilu tersebut, pondok pesantren Miftahul Huda 06 yang berdiri didesa Sukapura kecamatan Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat ikut berpartisipasi dalam penerapan nilai demokrasi pada pilukada 2017 tersebut, baik partisipasinya dalam persiapan pemilihan umum pada saat masa kampanye,

maupu dalam pelaksanaan pemilihan umum pada saat pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Setelah melalui kajian teori dan penelitian lapangan, maka penerapan demokrasi dipondok pesantren Miftahul Huda 06 pada pilukada 2017 kabupaten Lampung Barat dapat penulis analisis sebagai berikut:

1. Mengingatkan kepada para santri bahwa pemberian suara bukan hal yang sepele, namun akan menentukan laju kepemimpinan 5 tahun kedepan

salah satu nilai yang terkandung dalam system pemerintahan demokrasi adalah nilai ketaatan pada peraturan yang berlaku. Nilai ketaatan pada peraturan yang berlaku ini akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang damai tanpa mengalami gangguan keamanan sehingga akan terciptanya masyarakat yang sejahtera, sebab dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, masyarakat akan berada dalam keadaan yang tenang dan damai.

Masyarakat yang taat terhadap peraturan yang berlaku akan lebih mudah untuk diarahkan kepada pembangunan masyarakat, baik pembangunan masyarakat dalam bidang sosial budaya, sosial keagamaan maupun pembangunan pada bidang sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena setiap program pembangunan masyarakat akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan cara mengikuti apa yang telah menjadi strategi pembangunan oleh pemimpin dari masyarakat tersebut.

Pemilihan pemimpin yang tepat yang berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin tersebut pantas dan layak untuk menjadi seorang pemimpin akan sangat membantu bagi masyarakat yang menganut nilai patuh dan taat terhadap peraturan

yang berlaku. Sebab pemimpin yang memang layak dan berkompeten dalam posisi kepemimpinannya akan benar-benar menjalankan amanah yang diembannya sebagai pemimpin ummat. Maka dari itu pemilihan pemimpin yang tepat merupakan salah satu unsur yang sangat mendukung bagi kesejahteraan masyarakat demokrasi yang memiliki nilai patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 sangat mengerti dan memahami akan permasalahan ini. Hal ini terlihat dari upaya pondok pesantren Miftahul Huda 06 dalam mengajarkan kehati-hatian dalam memilih pemimpin pada pemilu pada 2017 di kabupaten Lampung Barat. pondok pesantren Miftahul Huda 06 menekankan kehati-hatian ini dengan cara memberikan pemahaman kepada santri dan ustad di pondok pesantren Miftahul Huda 06 khususnya bahwa pada saat melakukan pemberian suara pada hari pemungutan suara pada saat itu juga mereka sedang bersaksi kepada Allah SWT bahwa yang menjadi pilihannya tersebut adalah orang yang benar-benar memiliki integritas untuk menjadi pemimpin kabupaten Lampung Barat 5 tahun kedepan.

Hal ini dipekuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda 06, ky. Babussalam Asysya'roni pada tanggal 5 februari 2018:

“saya sendiri selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan menjelang pemilu tahun 2017 bahwa para santri juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menyuarakan pilihannya pada acara pemilihan umum tersebut, jadi mereka memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Namun tetap saya pribadi mengingatkan bahwa pada saat mereka menentukan pilihan waktu

pencoblosan, maka mereka saat itu sedang bersaksi kepada Allah bahwa pilihannya tersebut layak untuk menjadi pemimpin Lampung Barat 5 tahun kedepan maka mereka perlu benar-benar berhati-hati dalam menentukan pilihan, perhatikan baik-baik siapa yang akan mereka pilih tersebut.”

Sebagai kalangan orang yang berpengetahuan agama, santri dan ustadz pondok pesantren Miftahul Huda 06 tentu memahami bahwa kesaksian merupakan sebuah pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sebab mereka pasti memahami bahwa salah satu azab yang ada pada hari kiamat kelak adalah azab yang akan diberikan kepada orang yang memberikan kesaksian palsu.

2. Memberikan bantuan tenaga pada acara pemungutan suara.

Proses pemungutan suara adalah sebuah proses yang sangat krusial dalam pesta demokrasi atau pemilu, sebab kesalahan yang dilakukan pada proses pemungutan suara akan berakibat pada dirugikannya salah satu pihak serta tidak akan tersalurkan suara dari masyarakat. Jika hal ini terjadi tentu penyaluran suara dari rakyat yang diharapkan pada proses pemungutan suara tidak akan terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintahan yang menganut system demokrasi yaitu terciptanya pemerintahan yang berasal dari rakyat (pilihan mayoritas) dan untuk rakyat (seluruh masyarakat tanpa memandang mayoritas dan minoritas). Hal ini karena kemungkinan manipulasi suara yang memungkinkan calon dengan suara rendah dapat dimanipulasi menjadi pemenang pemilihan umum atau pemilu.

Beberapa kecurangan yang mungkin saja terjadi pada kegiatan pemungutan suara misalnya adalah panitia pemungutan suara merupakan relawan partai politik tertentu sehingga panitia tersebut berupaya untuk memenangkan partai politik tersebut,

dipersulitnya warga masyarakat yang akan memilih jika diketahui warga masyarakat tersebut bukan berasal dari golongan partisipan partai politik tertentu, melakukan pembengkakan suara dengan cara memberikan kartu suara ganda kepada pemilih yang merupakan relawan partai politik tertentu, melakukan kecurangan dengan merusak surat suara menggunakan kuku tangan pada saat penghitungan suara (hal ini dilakukan dengan melihat secara sepintas mengenai siapa yang dipilih dalam kartu suara bersangkutan, jika dilihat bukan calon yang didukung oleh petugas penghitung suara, maka surat suara tersebut akan dirusak menggunakan kuku tangan pada saat dia membuka dan memperlihatkan kartu suara kepada para saksi. Dan kecurangan-kecurangan lain yang mungkin dilakukan pada saat acara pemungutan suara.

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada saat pemungutan suara tentu akan sangat bertentangan dengan tujuan dari pemilihan umum tersebut, adapun tujuan dari pemilihan umum adalah Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat. Sehingga jika pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan kecurangan, tentu perwujudan hak politik dari rakyat tersebut akan terhambat.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 tidak menginginkan kecurangan terjadi pada saat pemungutan suara tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Pondok Pesantren Miftahul Huda ikut melakukan control terhadap berlangsungnya proses pemilihan Umum tersebut.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda 06 pada tanggal 5 februari 2018.:

“Pemungutan suara pada pilkada 2017 tersebut sangat menentukan bagaimana kepemimpinan kabupaten Lampung Barat 5 tahun kedepan, jadi tentu kami sangat tidak menginginkan proses vital tersebut diwarnai oleh kecurangan-kecurangan, makanya saya mengizinkan pada waktu ketua dusun (KADUS) meminta bantuan tenaga kepada pondok pesantren untuk membantu mengawal berlangsungnya proses pemungutan suara tersebut. Pada waktu itu ada dua orang ustadz kita yang ikut berpartisipasi sebagai petugas pelaksana pemungutan suara di desa Sukapura ini, yaitu ustadz hadi, dan ustadz wawan. Saya rasa itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pondok pesantren Miftahul Huda sangat mendukung berlangsungnya pemilihan umum yang lancar, jujur dan tidak terdapat kecurangan-kecurangan didalamnya.”

3. Mengizinkan para santri dan ustadz untuk menghadiri pertemuan kampanye pasangan calon bupati di desa Sukapura.

Pesta demokrasi atau pemilihan umum sangat identik dengan kegiatan kampanye. kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.

Adapun manfaat kampanye bagi masyarakat adalah sebagai sarana pengenalan terhadap calon pemimpin. Pengenalan yang dimaksudkan disini adalah pengenalan secara sepintas, baik mengenai kondisi fisik calon kepala daerah tersebut, maupun pengenalan mengenai program atau visi misi dari calon yang bersangkutan. Dikatakan pengenalan secara sepintas karena pada saat kampanye mustahil seorang calon pemimpin akan dapat mengeluarkan jati diri yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena terbatasnya waktu yang dimiliki oleh calon tersebut untuk mengenalkan dirinya serta memang pada dasarnya kampanye bertujuan untuk menarik simpati calon pemilih, sehingga sudah pasti calon pemimpin tersebut hanya akan berbicara

mengenai dirinya dalam sisi yang baik-baik saja. Baik dalam bidang prestasinya terdahulu maupun tentang visi dan misinya kedepan. Untuk dapat mengenal lebih jauh mengenai calon pemimpin tersebut, tentu rakyat sebagai calon pemilih harus mencari informasi dari pihak ketiga mengenai kredibilitas dan prestasi dari calon pemimpin tersebut.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06, sangat menghendaki para pemilih khususnya santri dan ustadz pondok pesantren Miftahul Huda 06 menjadi pemilih yang cerdas, bahkan pondok pesantren Miftahul Huda menekankan bahwa pemberian suara akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak, oleh sebab itu calon pemilih tentu harus sangat yakin dengan pilihannya bahwa yang dipilih tersebut memang pantas untuk menjadi pemimpin kabupaten Lampung Barat 5 tahun kedepan dari tahun 2017. Untuk dapat menentukan pilihan yang tepat tersebut, tentu mereka harus mengenal siapa yang akan mereka pilih (calon kepala daerah) tersebut. Hal inilah yang menurut penulis menjadi alasan bagi pondok pesantren Miftahul Huda 06 mengizinkan para santri dan ustadz pondok pesantren Miftahul Huda 06 untuk menghadiri kampanye dari pasangan calon kepala daerah didesa Sukapura kecamatan Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat.

Analisis penulis mengenai hal ini diperkuat dengan jawaban dari pimpinan pondok pesantren pada saat penulis melakukan wawancara dengan beliau. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa:

“Kampanye itu sebenarnya sebagai media bagi masyarakat untuk dapat mengenal siapa calon pemimpinnya dan apa saja program kerja yang akan dilakukannya apabila dia terpilih, bukan seperti fenomena saat ini yang justru

menjadikan kampanye sebagai waktu untuk mencari keuntungan ekonomi saja. Terkait kampanye sebelum pilukada 2017 kemarin, saya memang mengizinkan ustadz dan santri untuk ikut hadir saat pasangan-pasangan calon bupati melakukan pertemuan kampanye, namun saya tetap mengingatkan bahwa tujuan mereka menghadiri acara tersebut adalah untuk mengenal calon bupati, apabila informasi pada saat itu belum dirasa cukup, maka saya mengingatkan untuk mencari informasi dari pihak ketiga mengenai bagaimana rekam jejak dari calon pemimpin tersebut. Sehingga mereka dapat membandingkan yang mana dari dua pasang calon tersebut yang pantas untuk menjadi pemimpin Lampung Barat 5 tahun kedepan. Tujuannya supaya pada saat pemilihan umum mereka sudah dapat menentukan siapa yang akan mereka pilih.”

4. Memanfaatkan Mading sebagai media peringatan pemilu yang jujur dan adil.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan ciri khas dari demokrasi. Dimana dalam acara ini pemerintahan dalam periode yang dihadapi akan ditentukan mengenai siapa yang akan menduduki posisinya. Karena vitalnya pemilihan umum terhadap keberlangsungan pemerintahan, maka tentu proses pemilu juga harus dilakukan dengan adil dan terbuka. pemilu harus menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga dengan pemilu yang menjunjung 6 asas tersebut pemerintahan akan dijalankan oleh orang yang memang menurut masyarakat pantas untuk dijadikan pemimpin mereka. Selain itu pemilu yang berlandaskan pada keenam asas tersebut akan menghasilkan pemimpin yang mengawali kepemimpinannya dengan jujur. Bukan pemimpin yang mengawali kepemimpinan dengan kecurangan dan ketidak adilan. Jika awal kepemimpinannya saja sudah diwarnai dengan kecurangan, tentu akan sulit untuk mengharapkan pemerintahan yang bersih dari kecurangan.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pemilihan umum yang jujur dan adil tersebut. bahwa pondok pesantren Miftahul Huda 06 sangat ingin pemilu yang akan dilakukan pada tahun 2017 tersebut jauh dari kecurangan dan ketidakadilan. Baik kecurangan yang terjadi pada proses kampanye, proses pemungutan suara, maupun kecurangan yang mungkin dilakukan pada proses penghitungan suara. Sebagai bentuk realisasi dari keinginannya tersebut, bahkan pondok pesantren Miftahul Huda 06 memanfaatkan majalah dinding pondok pesantren untuk mengkampanyekan pemilu yang jujur dan adil tersebut.

Analisis ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh pengelola madding pondok pesantren Miftahul Huda 06. Beliau mengatakan bahwa:

“Madding ini dimanfaatkan untuk menyalurkan pendapat atau kritikan warga pesantren atau juga bias menjadi wadah untuk para santri yang ingin mengasah kemampuan menulis mereka, baik menulis artikel ataupun kaligrafi dan kalmia-kalimat bijak dari para ulama islam terdahulu. Tentu para santri ataupun mereka yang ingin memasang tulisan mereka di madding ini tidak dapat secara langsung memasang tulisannya di madding, tetapi ada proses dan alur yang harus diikuti, yaitu pertama para santri akan menyerahkan hasil tulisannya kepada pengurus madding, kemudian pengurus madding akan menyeleksi mana tulisan yang layak untuk dipasang mana yang tidak, baru setelah selesai dari seleksi tersebut tulisan yang dinyatakan layak pasang akan di pasang oleh pengurus madding. Tema karya tulis yang dibuat biasanya musiman, sesuai dengan fenomena yang sedang hangat ditengah-tengah masyarakat. Pada waktu menjelang pemilu 2017, banyak sekali tulisan yang dikhususkan untuk menegakkan kejujuran, keadilan dan kepemimpinan.”

B. penerapan nilai demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06

Sebagai pondok pesantren salafi, pondok pesantren Miftahul Huda 06 menggunakan kitab-kitab klasik sebagai kitab rujukan pendidikan. Namun, walaupun demikian, didalam proses pengajarannya pondok pesantren Miftahul Huda 06 bukanlah termasuk pondok pesantren yang kaku terhadap perkembangan berfikir para

santri. Banyak sekali strategi pembelajaran dan penyelenggaraan pondok pesantren yang sistemnya diperbaharui sehingga lebih modern namun tetap memiliki ciri khas sebagai pondok pesantren tradisional. Hal ini tentu merupakan salah satu bentuk dari fungsi kyai yang merupakan tokoh sentral di pondok pesantren. Kyai yang memimpin pondok pesantren Miftahul Huda 06 melakukan pembaharuan system yang bertujuan untuk menjadikan pondok pesantren Miftahul Huda 06 sebagai tempat pembentukan masyarakat yang berfikir modern namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama islam.

bahwa system penyelenggaraan pondok pesantren secara teoritis bukan system penyelenggaraan yang berasaskan demokrasi. System penyelenggaraan dari pondok pesantren lebih cenderung kepada pemerintahan kerajaan yang memiliki faham bahwa kyai adalah tokoh utama yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap pondok pesantren. Hal ini mungkin saja terjadi karena memang pemerintahan demokrasi yang bukan berasal dari ajaran agama islam, sehingga pondok pesantren yang secara alamiah merupakan lembaga islam tentu akan memilih system pengelolaan yang islami. Dan tentu saja demokrasi tidak akan menjadi pilihan dari para pengelola pondok pesantren.

meskipun menganut system penyelenggaraan yang berbasis kekuasaan kyai, namun pondok pesantren Miftahul Huda 06 tetap menjalankan dan menerapkan beberapa asas dari demokrasi dalam kegiatan operasionalnya. Beberapa poin yang menurut penulis merupakan sebuah penerapan asas demokrasi dari pondok pesantren Miftahul Huda 06 adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung kebebasan santri

Salah satu ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi adalah kebebasan menentukan pilihan atau kebebasan berpendapat. dalam system pemerintahan demokrasi, nilai yang berperan didalamnya adalah nilai kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan yang bertanggungjawab adalah kebebasan yang tetap memperhatikan kebebasan orang lain yang juga memiliki kebebasan yang sama. Jangan sampai terjadi jika kebebasan yang dilakukan akan menghambat atau bahkan menghilangkan kebebasan orang lain. Jika kebebasan yang dilakukan oleh seseorang mengganggu kebebasan orang lain, maka yang akan timbul adalah konflik, karena ada seseorang yang merasa kebebasannya tidak dihargai.

Kebebasan dalam kehidupan demokratis lebih ditekankan kepada kebebasan menentukan pilihan, kebebasan berpendapat serta kebebasan mengekspresikan diri atau aktualisasi diri, bukan kebebasan bertindak yang dapat mengganggu orang-orang yang ada disekitar kita.

Didalam penyelenggaraan pondok pesantren, kyai Babussalam Asysya'roni selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda 06 sangat mengutamakan akan kebebasan para santrinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan kyai Babussalam Asysya'roni pada saat penulis melakukan wawancara:

“Pondok pesantren Miftahul Huda merupakan tipe pesantren salaf. Namun untuk kenyamanan dalam belajar, pondok pesantren memberikan pilihan ustadz kepada para santri untuk mengajar mereka dalam mata pelajaran tertentu. Setidaknya ada 2 orang ustadz dari setiap mata pelajaran yang dapat mereka pilih untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda. Hal ini kami lakukan agar para santri memiliki kenyamanan dalam menimba ilmu di pondok pesantren Miftahul Huda 06 ini. Sehingga ilmu yang dipelajari dapat lebih mudah untuk diingat dan diamalkan oleh santri.”

2. Memberikan kesempatan yang sama kepada santri

Kesempatan merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seseorang terutama apabila seseorang tersebut masih dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan. Sebuah kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi misalnya, merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Bahkan ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa bagi mereka yang sangat menginginkan pendidikan namun tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkannya maka kesedihan yang akan nampak dari raut mukanya. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa kesempatan merupakan hal yang sangat tinggi nilainya.

demokrasi adalah sebuah system pemerintahan yang menjamin persamaan hak warga negaranya. Setiap warga Negara penganut system demokrasi memiliki hak yang sama dalam mengatur kehidupannya, serta memiliki hak yang sama untuk menikmati program dari pemerintahnya.

Kyai Babussalam Asysya'roni sebagai kyai pondok pesantren Miftahul Huda 06 membuat kebijakan persamaan hak ini dalam system pembelajaran yang dilakukan dipondok pesantren Miftahul Huda 06. Bentuk persamaan hak ini sebagaimana yang diungkapkan oleh H. M.Syukron Djazilan Badri pada saat diwawancarai pada tanggal 5 februari 2018:

“pendidikan tidak dipandang sebagai proses pemaksaan dari seseorang pendidik untuk menentukan setiap langkah yang harus diterima oleh peserta didiknya secara individual” dengan demikian dalam proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik

sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan. Sebab semua itu pasti akan menghambat terserapnya ilmu pengetahuan yang mereka pelajari.”

3. Menyediakan media penyalur aspirasi santri

Kebebasan berpendapat merupakan satu nilai demokrasi yang sangat khas. bahkan system pemerintahan selain demokrasi tidak memiliki nilai kebebasan berpendapat ini. Kebebasan berpendapat tidak dijamin keberadaannya dalam system pemerintahan selain demokrasi, tapi dalam Negara demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi satu hal yang sangat terjamin keberadaannya. Masyarakat dapat dengan bebas menyatakan aspirasi dan pendapatnya, yang diatur hanyalah cara penyampaian pendapat atau aspirasi tersebut. Dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat tentu harus memperhatikan kode etik dan peraturan tentang kesopanan (artinya jangan sampai aspirasi disampaikan dengan cara yang tidak layak atau tidak sopan dilakukan), pencemaran nama baik (apabila aspirasi tersebut menyangkut orang atau tokoh tertentu, maka harus diperhatikan konteksnya, jangan sampai aspirasi tersebut hanyalah hoax yang dapat mencemarkan nama baik tokoh bersangkutan), ketenangan umum (dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat, masyarakat sebagai warga Negara penganut system demokrasi tidak dibenarkan untuk mengganggu ketenangan umum, misalnya mengganggu ketenangan peribadatan atau mengganggu proses pendidikan).

Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat seorang warga masyarakat.

Kebebasan berpendapat yang tidak tersensor dalam pernyataan tersebut berarti masyarakat bebas menyatakan aspirasinya tanpa boleh dikekang atau ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu.

Ky Babussalam Asysya'roni, selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda 06 sangat mendukung akan adanya kebebasan berpendapat ini. Kebebasan berpendapat ini bahkan difasilitasi oleh pondok pesantren Miftahul Huda 06 dengan menyediakan madding (majalah dinding) sebagai wadah para santri dan ustadz yang ingin menyampaikan aspirasi, pendapat tentang sebuah permasalahan, atau sekedar mempublikasikan karya tulis yang mereka buat.

Pendapat diatas diperkuat dengan jawaban dari M. Zaini Dahlan saat penulis mewawancarai beliau dipondok pesantren Miftahul Huda pada tanggal 5 februari 2018:

“Kebanyakan orang kan merasa canggung untuk menyampaikan aspirasinya jika harus dilakukan secara langsung dalam sebuah musyawarah atau pertemuan langsung, makanya kami selaku rois pondok pesantren Miftahul Huda menyediakan madding sebagai media penyalur aspirasi para santri dan ustadz. Sehingga setiap orang dapat menyampaikan aspirasinya melalui madding tersebut. Penempatannya di masjid Karena masjid kan sebagai tempat yang akan dikunjungi oleh semua lapisan pondok pesantren, baik kiyai, ustadz, santri, bahkan masyarakat sekitar pondok pesantren. Jadi aspirasi yang disampaikan bias dilihat dan dibaca oleh semua lapisan pondok pesantren. Makanya madding ini kami letakkan di masjid pondok pesantren ini.”

Keberadaan madding di pondok pesantren Miftahul Huda 06 ini menjadi bentuk upaya pondok pesantren dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06.

4. Menerapkan pemilu untuk menentukan perwakilan kiyai.

System pemerintahan demokrasi adalah system pemerintahan yang pemimpinnya ditentukan melalui pilihan mayoritas warga negaranya. Salah satu sisi positif dari penentuan pemimpin dengan suara terbanyak ini adalah dihasilkannya pemimpin yang sosoknya diinginkan oleh sebagian besar rakyatnya. Dengan demikian peraturan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut berkemungkinan besar untuk mudah diterima dan di jalankan oleh masyarakatnya. Hal ini tentu didasari oleh pemikiran bahwa pemimpin tersebut terpilih karena masyarakat yang menunjuk, maka kebijakannya harus pula masyarakat menerimanya.

Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 juga menggunakan system pemilihan umum untuk menentukan pemimpin santri (ro'is). Pemilihan umum yang dilakukan memang tidak berkala sebagaimana pemilihan kepala daerah, namun pemilihan yang dilakukan untuk menentukan ro'is atau ketua pondok ini merupakan bentuk perwujudan demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ky. Babussalam Asysya'roni pada saat diwawancarai pada tanggal 5 februari 2018.:

“Penunjukkan rois dan perangkat penyelenggara pondok pesantren dilakukan melalui pemilihan umum oleh santri, sehingga santri akan mengetahui dan mengenal kepengurusan yang berjalan, namun mekanisme tidak seperti pemilihan umum yang

dilakukan oleh sekolah umum dalam menentukan pengurus OSIS nya, disini tidak ada pendaftaran calon, artinya para santri tidak berhak untuk mencalonkan diri, tetapi kyai lah yang berhak menunjuk siapa yang akan menjadi calon rois dan pengurusnya, baru kemudian para santri diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan dijadikan rois, kalau dari segi mekanisme pemungutan suara sampai pada penghitungan suara itu sama saja dengan pemilihan umum yang lainnya, dimana para santri akan memberikan satu suara kepada calon rois, kemudian setelah semua suara telah diberikan baru kemudian kita lakukan penghitungan suara, nanti yang memiliki suara terbesar dia yang akan menjadi rois di pondok pesantren Miftahul Huda 06 dalam satu priode, yaitu selama 2,5 tahun atau jika rois tersebut melanggar peraturan pondok pesantren”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demokrasi adalah sebuah system pemerintahan dan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis Islam yang berada dibawah pemerintahan demokrasi. Sebagai sebuah lembaga yang berada dibawah pemerintahan yang bersistem demokrasi, maka pondok pesantren Miftahul Huda 06 turut berpartisipasi dalam terwujudnya proses demokrasi di kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017.

Sebagai partisipasi dalam kegiatan pesta demokrasi tahun 2017 di kabupaten Lampung Barat, pondok pesantren Miftahul Huda 06 mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pesta demokrasi tersebut. Mulai dari masa kampanye, masa pemilihan hingga masa perhitungan hasil pemilihan. Partisipasi tersebut merupakan upaya pondok pesantren Miftahul Huda 06 dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi pada pemilu pada 2017 kabupaten Lampung Barat.

Sebagai bentuk penerapan nilai demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda 06, maka beberapa program kegiatan maupun fasilitas pondok pesantren dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi didalamnya. Beberapa kegiatan pondok pesantren yang merupakan bentuk penerapan nilai demokrasi diantaranya adalah mengupayakan kebebasan santri menentukan ustadz Pembina pengajian, Memberikan kesempatan yang sama kepada santri dalam kegiatan pengkajian ilmu, Menyediakan media penyalur aspirasi santri, menerapkan pemilihan umum untuk menunjukkan ro'is, menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan.

B. Saran – Saran

sebelum menutup bab ini, kiranya perlu dikemukakan saran-saran terkait dengan tema skripsi ini.

bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, setiap ajarannya adalah ajaran yang mengandung kebaikan. Maka tidak ada kebaikan-kebaikan didunia yang bertentangan dengan ajaran islam. demokrasi memang bukan system pemerintahan yang berasal dari agama islam. namun nilai-nilai kebaikan yang ada dalam demokrasi tentu tidak bertentangan dengan ajaran islam. nilai-nilai kebaikan yang tidak bertentangan dengan Islam ini dapat menjadi peluang bagi aktifis Islam yang ingin menjalankan syariat Islam dan tidak mengundang permasalahan dalam kegiatan bernegara, sehingga terwujudlah Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*. Kepada pondok pesantren Miftahul Huda 06, bahwa penyelenggaraan pesantren dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi dapat menjadi penanaman pemahaman secara tidak langsung kepada santri bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan semua system dimuka bumi, termasuk demokrasi, maka penerapan nilai-nilai demokrasi dipondok pesantren sangat perlu untuk dilakukan dengan lebih detail dan teliti agar pondok pesantren benar-benar mencetak calon masyarakat yang menjadi pencerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi fakultas Ushuluddin besar harapan penulis agar melakukan pengkajian yang lebih luas tentang demokrasi dan Islam. agar pembahasan yang dilakukan dapat lebih mendalam dan lebih luas kajiannya

Bagi mahasiswa fakultas Ushuluddin karena beragama tidak harus menjadi penentang Negara, maka nilai-nilai bernegara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam perlu untuk didukung pelaksanaannya.

c. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat serta Hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti, serta tidak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa dinanti-nantikan syafa'atnya dihari akhir nanti. Atas segala saran serta kritik dari semua pembaca yang budiman, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga semoga Allah SWT dapat memberikan ganjaran yang sesuai dengan amal ibadahnya.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan motivasi kepada penulis, semoga semua yang diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh disisi Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Antar Venus. *Manajemen Kampanye*. (Jakarta : PT Gramedia Utama, 2004).
- Arifin, Ahmad, *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi Dan Aktualisasi Pendidikan Islam Ditengah Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Jurgen habermas*, (Jakarta: Yogyakarta: 2009).
- Budi Setiyono dan RTS Masli, *Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum*, (Jakarta : AdGoal Com, 2008).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (cet. XIII), (Jakarta : Bumi Aksara, 2013).
- Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003).
- Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat, Kyai Pesantren-Kyai Langgar Di Jawa*, (Yogyakarta: LKiS Yogya 1999).
- Ebyhara, Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik*, (Ar-Ruzz Media, 2016), cet III.
- Etta Mamang Sangaji dan Sopiha, *Metodelogi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (ed. I), (Yogyakarta : ANDI, 2010).
- Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987).
- Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Harjono, *Negara Hukum, Demokrasi. Dan Makamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif (Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum, volume II Nomor III, 2010,).

Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD, *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008.

Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990).

Imron Ariefin, *Kepemimpinan Kyai: Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993).

Iriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984).

K. Bertam, *Etika*, cetakan kedelapan, (Jakarta: Gramedia, 2004)

M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan islam (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1995.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994)

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001)

Mubaraq , Zulfi, *Konspirasi Politik Elit Tradisional di Era Reformasi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2006).

Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1998)

Mujar Ibnu Syarif , *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Mujamil Qamar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Grasindo, 1992).

Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami, Kyai & Pesantren*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, cet. I, 2007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (ed. revisi V, cet. XII), (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002)

Winanti, S. Poppy dan Titok Hariyanto, *Demokrasi dan Civil Society*.
(Yogyakarta: IRE Press, 2004).

Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing,
2001)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, KodePos 35131 Telp (0721) 78088 / Fax 780422

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SENIN 5 FEBRUARI 2018, PUKUL
08:30 PAGI DI KANTOR PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA 06)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : H. M.Syukron Djazilan Badri
Umur :42
Jabatan : Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Huda 06.
Jenis kelamin :laki-laki
Alamat : desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat

II. HASIL WAWANCARA

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak mengenai system pergantian pemimpin setiap lima tahun yang ada pada pemerintahan demokrasi di Negara kita?

H. M. Syukron Djazilan Badri : penyelenggaraan pemerintahan itu memang harus dilakukan dengan sangat cermat, mengingat penyelenggaraan itu adalah penentu kesejahteraan masyarakat serta aspek social budaya dan agama yang ada didalamnya. Dengan adanya pergantian pemimpin setiap lima tahun, maka akan ada pembaruan ide dan sosok pemimpin untuk dapat membawa Negara ini menjadi lebih maju lagi.

Peneliti : lalu menurut bapak apakah cara penentuan pemimpin dengan pemilihan umum cukup efektif dalam menghasilkan pemimpin yang ideal?

H. M. Syukron Djazilan Badri: saya sangat setuju dengan pemilihan umum sebagai cara menentukan pemimpin. Sebab dengan dipilihnya pemimpin secara langsung oleh

rakyat, maka kita akan melihat siapa pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga pemerintahan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat tentu akan dipatuhi oleh rakyat, sebab mereka lah yang memilih pemimpin tersebut sebagai pemimpin mereka. Namun memang sering kita temui kenyataan bahwa masyarakat kita memilih pemimpin bukan karena kemampuan atau kepantasan calon tersebut untuk menjadi pemimpin, tetapi mereka banyak yang memilih karena mendapatkan bayaran, inilah yang membuat pemimpin yang dihasilkan dari pemilu malah sering melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat.

Peneliti : dari fihak pondok pesantren apakah ada pengarahan untuk memilih kepada salah satu calon saja pak?

H. M. Syukron Djazilan Badri: kalau pengarahan tidak ada, kita hanya diarahkan untuk mendukung terciptanya pemilukada yang bersih saja. Kalau tentang pilihan pribadi tidak ada pengarahan dari fihak pondok pesantren ataupun kiyai. Memang kiyai pernah menyampaikan tentang pilihan, tapi bukan pengarahan kepada salah satu calon. Kiyai hanya menunjukkan bagaimana cara menentukan pilihan yang benar.

Peneliti : kalau dari kyai pondok pesantren sendiri apakah pernah melakukan pertemuan dengan salah satu calon bupati pada saat itu pak?

H. M. Syukron Djazilan Badri: Setau saya kalau pertemuan pribadi seperti calon bupati yang berkunjung ke kediaman kyai, itu tidak pernah.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, KodePos 35131 Telp (0721) 78088 / Fax 780422

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SENIN 5 FEBRUARI 2018, PUKUL
08:30 PAGI DI KANTOR PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA 06)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : H. M. Syukron Djazilan Badri
Umur : 42
Jabatan : Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Huda 06.
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat

II. HASIL WAWANCARA

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak mengenai system pergantian pemimpin setiap lima tahun yang ada pada pemerintahan demokrasi di Negara kita?

H. M. Syukron Djazilan Badri : penyelenggaraan pemerintahan itu memang harus dilakukan dengan sangat cermat, mengingat penyelenggaraan itu adalah penentu kesejahteraan masyarakat serta aspek social budaya dan agama yang ada didalamnya. Dengan adanya pergantian pemimpin setiap lima tahun, maka akan ada pembaruan ide dan sosok pemimpin untuk dapat membawa Negara ini menjadi lebih maju lagi.

Peneliti : lalu menurut bapak apakah cara penentuan pemimpin dengan pemilihan umum cukup efektif dalam menghasilkan pemimpin yang ideal?

H. M. Syukron Djazilan Badri: saya sangat setuju dengan pemilihan umum sebagai cara menentukan pemimpin. Sebab dengan dipilihnya pemimpin secara langsung oleh

rakyat, maka kita akan melihat siapa pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga pemerintahan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat tentu akan dipatuhi oleh rakyat, sebab mereka lah yang memilih pemimpin tersebut sebagai pemimpin mereka. Namun memang sering kita temui kenyataan bahwa masyarakat kita memilih pemimpin bukan karena kemampuan atau kepantasan calon tersebut untuk menjadi pemimpin, tetapi mereka banyak yang memilih karena mendapatkan bayaran, inilah yang membuat pemimpin yang dihasilkan dari pemilu malah sering melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat.

Peneliti : dari fihak pondok pesantren apakah ada pengarahan untuk memilih kepada salah satu calon saja pak?

H. M. Syukron Djazilan Badri: kalau pengarahan tidak ada, kita hanya diarahkan untuk mendukung terciptanya pemilukada yang bersih saja. Kalau tentang pilihan pribadi tidak ada pengarahan dari fihak pondok pesantren ataupun kiyai. Memang kiyai pernah menyampaikan tentang pilihan, tapi bukan pengarahan kepada salah satu calon. Kiyai hanya menunjukkan bagaimana cara menentukan pilihan yang benar.

Peneliti : kalau dari kyai pondok pesantren sendiri apakah pernah melakukan pertemuan dengan salah satu calon bupati pada saat itu pak?

H. M. Syukron Djazilan Badri: Setau saya kalau pertemuan pribadi seperti calon bupati yang berkunjung ke kediaman kyai, itu tidak pernah.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, Kode Pos 35131 Telp (0721) 78088 / Fax 780422

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SELASA 6 FEBRUARI
2018, PUKUL 15:00 SORE DI KANTIN KEJUJURAN PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL HUDA 06)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Sabitta Izzati

Umur : 23

Jabatan : -

Jenis kelamin : perempuan

Alamat : dusun tuguratu kecamatan Suoh Lampung Barat

Pekerjaan : santri

II. HASIL WAWANCARA

Peneliti : sejak tahun berapa anda menjadi santri di pondok pesantren Miftahul
Huda 06?

Sabitta Izzati: saya menjadi santri di pondok pesantren Miftahul Huda 06 sejak tahun
2011

Peneliti : apakah anda sudah ikut memilih waktu pemilu pada 2017 kemarin?

Sabitta Izzati : iya. Saya sudah ikut memilih waktu itu.

Peneliti : dimana anda memilih waktu itu?

Sabitta Izzati: saya memilih di kecamatan Suoh

Peneliti : lalu bagaimana dengan kegiatan mengaji anda kalau anda memilih di kecamatan Balik Bukit?

Sabitta Izzati: kita diberikan libur 2 hari untuk memilih kalau yang jauh, jadi ya nggak papa saya pulang dulu untuk memilih

Peneliti : adakah pengarahan dari kyai tentang pemilihan umum 2017 tersebut?

Sabitta Izzati: ada, waktu itu kyai mengarahkan bahwa pemilu ini penting untuk kelangsungan kabupaten Lampung Barat, jadi kita nggak boleh main-main dalam menentukan pilihan kita.

Peneliti : selain pengarahan itu, apa ada pengarahan lain, missal waktu kampanye, atau waktu pemungutan suara?

Sabitta Izzati: untuk waktu kampanye kita diarahkan agar menghadiri pertemuan kampanye. yang ada didesa Sukapura ini.

Peneliti : apa hal yang didapatkan waktu menghadiri pertemuan kampanye itu?

Sabitta Izzati: ya waktu kampanye itu calon bupati memperkenalkan diri, tentang darimana asalnya, apa sukunya, apa jabatan sebelum mencalonkan diri, apa program yang akan diberikan kalau jadi bupati, ya perkenalan biasa aja.

Peneliti : kalau dari kyai pernah nggak ngasih saran untuk milih siapa diantara dua calon itu?

Sabitta Izzati: saran yang diberikan kyai setau saya hanya cara yang bisa dilakukan untuk menentukan pilihan saja. Kyai nggak pernah kalau mengarahkan harus memilih pasangan tertentu dari dua pasangan calon itu.

Peneliti : pernah nggak kalau masa kampanye itu calon bupatinya datang kepondok?

Sabitta Izzati: kalau calon bupati yang datang kepondok setau saya nggak pernah. Waktu kampanye itu santri yang laki-laki yang datang ketempat pertemuan. kalau calon bupatinya nggak ke pondok

Peneliti : waktu pertemuan kampanye itu kyai ikut hadir juga apa nggak?

Sabitta Izzati: nggak. Kyai nggak ikut hadir, kyai di pondok saja, santri laki-laki sama ustadz yang hadir waktu itu

Peneliti : banyak yang hadir nggak santri dan ustadz waktu pertemuan kampanye itu?

Sabitta Izzati: saya nggak tau. Kan saya nggak ikut pertemuan itu.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, Kode Pos 35131 Telp (0721) 78088 / Fax 780422

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SELASA 6 FEBRUARI
2018, PUKUL 15:00 SORE DI KANTIN KEJUJURAN PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL HUDA 06)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Wawan Saefullah
Umur : 24
Jabatan : -
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : dusun Muara Aman kecamatan Balik Bukit Lampung Barat
Pekerjaan : santri

II. HASIL WAWANCARA

Peneliti : sejak tahun berapa anda menjadi santri di pondok pesantren Miftahul
Huda 06?

Wawan Saefullah: saya menjadi santri di pondok pesantren Miftahul Huda 06 sejak
tahun 2010

Peneliti : apakah anda sudah ikut memilih waktu pemilu pada 2017 kemarin?

Wawan Saefullah : iya. Saya sudah ikut memilih.

Peneliti : dimana anda memilih waktu itu?

Wawan Saefullah: saya memilih di balik bukit.

Peneliti : lalu bagaimana dengan kegiatan mengaji anda kalau anda memilih di kecamatan Balik Bukit?

Wawan Saefullah: kita diberikan libur 2 hari untuk memilih kalau yang jauh, jadio ya nggak papa saya pulang dulu untuk memilih

Peneliti : adakah pengarahan dari kyai tentang pemilihan umum 2017 tersebut?

Wawan Saefullah: ada, waktu itu kyai mengarahkan bahwa pemilu ini penting untuk kelangsungan kabupaten Lampung Barat, jadi kita nggak boleh main-main dalam menentukan pilihan kita.

Peneliti : selain pengarahan itu, apa ada pengarahan lain, missal waktu kampanye, atau waktu pemungutan suara?

Wawan Saefullah: untuk waktu kampanye kita diarahkan agar menghadiri pertemuan kampanye.yang ada didesa Sukapura ini.

Peneliti : apa hal yang didapatkan waktu menghadiri pertemuan kampanye itu?

Wawan Saefullah: ya waktu kampanye itu calon bupati memperkenalkan diri, tentang darimana asalnya, apa sukunya, apa jabatan sebelum mencalonkan diri, apa program yang akan diberikan kalau jadi bupati, ya perkenalan biasa aja.

Peneliti : kalau dari kyai pernah nggak ngasih saran untuk milih siapa diantara dua calon itu?

Wawan Saefullah: saran yang diberikan kyai setau saya hanya sebatas pada bagaimana menentukan pilihan saja. Kyai nggak pernah kalau mengarahkan harus memilih pasangan a atau b.

Peneliti : pernah nggak kalau masa kampanye itu calon bupatinya datang kepondok?

Wawan Saefullah: kalau datang kepondok nggak pernah. Pertemuannya di rumah warga, kita yang disuruh sama kyai kalau mau tau siapa calonnya ya datang aja kata kyai.

Peneliti : waktu pertemuan kampanye itu kyai ikut hadir juga apa nggak?

Wawan Saefullah: nggak. Kyai nggak ikut hadir, kyai di pondok saja, kita santri sama ustadz yang hadir waktu itu

Peneliti : banyak yang hadir nggak santri dan ustadz waktu pertemuan kampanye itu?

Wawan Saefullah: ya banyak, hampir semua santri laki-laki yang sudah memiliki hak pilih ikut hadir dalam pertemuan kampanye itu, cuman ada beberapa yang nggak ikut hadir karena pertemuannya malam dan ada santri yang baru sembuh, jadi dia tidak ikut. Kalau yang perempuan memang nggak ada yang ikut waktu itu karna pertemuannya malam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, KodePos 35131Telp (0721) 78088 / Fax 780422

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SENIN 5 FEBRUARI 2018,
PUKUL 07:30 PAGI DI MASJID JAMI' AL KHAIRIYAH PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL HUDA 06)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : kyai Babussalam Asysya'roni

Umur : 52

Jabatan : pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda.

Pekerjaan : da'i

Jenis kelamin : laki-laki

Alamat : Pondok pesantren Miftahul Huda 06, jl Rahmat Syatori no
92, Sukapura, Sumberjaya, Lampung Barat.

II. HASIL WAWANCARA

Peneliti: bagaimana demokrasi menurut pandangan kyai?

Kyai Babussalam Asysya'roni: demokrasi itu sebuah cara menjalankan roda pemerintahan. Ada pemerintahan yang didalam menjalankan negaranya menggunakan sistem kerajaan, ada yang menggunakan sistem khilafah, seperti pada masa khulafaurrasyidin, dan ada yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi seperti di negara kita ini. Sistem pemerintahan demokrasi kalau menurut saya pribadi merupakan sistem pemerintahan yang cocok dilakukan pada masyarakat modern seperti sekarang ini. Sebab masyarakat tidak hanya bertindak sebagai objek pemerintahan, namun juga dapat menjadi pengisi posisi pemerintahan. Selain itu pada sistem

demokrasi, masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang akan menjadi calon pemimpin mereka. Namun memang dibalik itu semua menurut pandangan saya selaku orang islam, ada kekurangan pada sistem demokrasi ini. Yaitu ada kesempatan bagi seorang yang tidak punya standar kepemimpinan menurut islam untuk menjadi pemimpin. Terlebih jika kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan yang kurang objektif atau yang sering kita lihat adalah masyarakat memilih seorang yang pada masa kampanye membagi-bagikan uang misalnya.

Peneliti: Bagaimana partisipasi pondok pesantren Miftahul Huda 06 dalam pemilukada di lampung barat pada tahun 2017?

kyai Babussalam Asysya'roni: Sebagai wadah pendidikan, kita memang tidak disentuh pada saat kampanye menjelang pemilukada 2017 kemarin, tetapi karena kita menyadari bahwa keberlangsungan pemilu tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan kabupaten Lampung Barat, yang secara tidak langsung tentu akan mempengaruhi kita sebagai salah satu lembaga yang berdiri di wilayah pemerintahan kabupaten Lampung Barat. Makanya kita sangat memperhatikan keberlangsungan pemilu tersebut. Kita ikut mengawasi agar pemilu tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak terdapat kecurangan, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas bagi Lampung Barat.

Peneliti: pengawasan yang seperti apa yang dilakukan oleh pondok pesantren Miftahul Huda 06 pada pemilukada tersebut?

kyai Babussalam Asysya'roni: ya kita melakukan pengawasan dengan cara tidak meninggalkan aktifitas politik terutama yang ada di desa Sukapura ini. misal ini kan para ustadz kita banyak yang memiliki kegiatan luar pondok seperti buruh bangunan, bertani, budidaya ikan dan lain sebagainya, artinya ustadz kita memiliki waktu untuk berbaur dengan masyarakat secara langsung. Jadi menjelang pemilu itu saya sendiri memang sudah mengingatkan kepada para ustadz khususnya untuk mencermati kegiatan-kegiatan politik yang ada di lapisan terbawah yaitu masyarakat kecil. Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan seperti money politik atau yang sejenisnya.

Peneliti: untuk materi-materi dakwah sendiri apa para ustadz diarahkan secara khusus untuk mengingatkan akan kejujuran berpolitik ini?

kyai Babussalam Asysya'roni: betul. Saya menganjurkan kepada para ustadz untuk menyampaikan pandangan islam mengenai kejujuran juga mengenai kecurangan. Ini kan kegiatan di desa ini ada yasinan bapak-bapak setiap

malam jumat di rumah penduduk secara bergiliran. Sebelum membaca rangkaian yasin dan tahlil diadakan kultum, yang mengisi kultum itu memang dari ustadz kita disini sering dimintai kesedian untuk mengisinya. Nah pada kesempatan-kesempatan seperti itulah ustadz-ustadz kita ini menyampaikan dakwah yang berisi tentang ancaman-ancaman bagi orang yang berlaku curang, menyuap, atau yang lain sebagainya.

peneliti: Adakah upaya yang dilakukan pondok pesantren kepada para santri terkait

pemilihan umum tahun 2017?

kyai Babussalam Asysya'roni: saya sendiri selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan menjelang pemilu tahun 2017 bahwa para santri juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menyuarakan pilihannya pada acara pemilihan umum tersebut, jadi mereka memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Namun tetap saya pribadi mengingatkan bahwa pada saat mereka menentukan pilihan waktu pencoblosan, maka mereka saat itu sedang bersaksi kepada Allah bahwa pilihannya tersebut layak untuk menjadi pemimpin Lampung Barat 5 tahun kedepan maka mereka perlu benar-benar berhati-hati dalam menentukan pilihan, perhatikan baik-baik siapa yang akan mereka pilih tersebut

peneliti: apakah ada perbedaan hak antara santriwan dan santriwati dalam mengikuti

demokrasi pada tahun 2017 ?

kyai Babussalam Asysya'roni: didalam memberikan suara saya tidak membedakan antara santri laki-laki dan santri perempuan. Semua sama saja, lagi pula pemberian suara kan dilakukan pada siang hari, jadi yang perempuan tidak akan bermasalah walaupun ikut datang ke tempat pemungutan suara. kecuali pada pertemuan kampanye yang dilakukan malam hari, santriwati memang tidak saya izinkan untuk mengikuti pertemuan.

Peneliti: apakah kyai memberikan pengarahan secara langsung untuk memilih salah

satu pasangan calon bupati?

Kyai Babussalam Asysya'roni: saya tidak pernah memberikan pengarahan kepada para santri untuk memilih salah satu pasangan calon bupati.

Peneliti: Pada saat kegiatan pemungutan suara pada pemilu pada tahun 2017 tersebut

apakah pondok pesantren MI Iftahul Huda 06 ikut berpartisipasi?

kyai Babussalam Asysya'roni: Pemungutan suara pada pemilu pada 2017 tersebut sangat menentukan bagaimana kepemimpinan kabupaten Lampung Barat 5 tahun kedepan, jadi tentu kami sangat tidak menginginkan proses vital

tersebut diwarnai oleh kecurangan-kecurangan, makanya saya mengizinkan pada waktu ketua dusun (KADUS) meminta bantuan tenaga kepada pondok pesantren untuk membantu mengawal berlangsungnya proses pemungutan suara tersebut. Pada waktu itu ada dua orang ustadz kita yang ikut berpartisipasi sebagai petugas pelaksana pemungutan suara di desa sukapura ini, yaitu ustadz hadi, dan ustadz wawan. Saya rasa itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pondok pesantren Miftahul Huda sangat mendukung berlangsungnya pemilihan umum yang lancar, jujur dan tidak terdapat kecurangan-kecurangan didalamnya.

Peneliti: Apakah santri dan ustadz diberikan izin untuk mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan sebelum pemilukada tersebut?

kyai Babussalam Asysya'roni :Kampanye itu sebenarnya sebagai media bagi masyarakat untuk dapat mengenal siapa calon pemimpinnya dan apa saja program kerja yang akan dilakukannya apabila dia terpilih, bukan seperti fenomena saat ini yang justru menjadikan kampanye sebagai waktu untuk mencari keuntungan ekonomi saja. Terkait kampanye sebelum pemilukada 2017 kemarin, saya memang mengizinkan ustadz dan santri untuk ikut hadir saat pasangan-pasangan calon bupati melakukan pertemuan kampanye, namun saya tetap mengingatkan bahwa tujuan mereka menghadiri acara tersebut adalah untuk mengenal calon bupatinya, apabila informasi pada saat itu belum dirasa cukup, maka saya mengingatkan untuk mencari informasi dari pihak ketiga mengenai bagaimana rekam jejak dari calon pemimpin tersebut. Sehingga mereka dapat membandingkan yang mana dari dua pasang calon tersebut yang pantas untuk menjadi pemimpin Lampung Barat 5 tahun kedepan. Tujuannya supaya pada saat pemilihan umum mereka sudah dapat menentukan siapa yang akan mereka pilih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, Kode Pos 35131 Telp (0721) 78088 / Fax 780422

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SELASA 6 FEBRUARI 2018, PUKUL
10:00 PAGI DI KANTIN KEJUJURAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA 06)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Muhammad Alki Hasan

Umur : 30

Jabatan : Santri pengelola mading Pondok Pesantren Miftahul Huda 06.

Alamat : dusun Sidomukti kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat

Pekerjaan : santri

II. HASIL WAWANCARA

Peneliti : apakah anda sudah berada di pondok pesantren ini saat pemilukada 2017 Lampung Barat kemarin?

Muhammad Alki Hasan: iya saya sudah menjadi santri waktu itu.

Peneliti : apakah anda sudah ikut memilih waktu itu?

Muhammad Alki Hasan : iya. Saya sudah ikut memilih.

Peneliti : dimana anda memilih waktu itu?

Muhammad Alki Hasan: saya memilih ditempat asal saya, di dusun Sidomukti kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat.

Peneliti : lalu bagaimana dengan kegiatan mengaji anda kalau anda memilih di Bandar negeri suoh?

Muhammad Alki Hasan: kita memang diberikan libur 2 hari kalau yang jauh, untuk dapat mengikuti pemilihan umum 2017.

Peneliti : adakah pengarahan dari kyai tentang pemilihan umum 2017 tersebut?

Muhammad Alki Hasan: ada, kita diarahkan untuk tidak menjadi golput waktu pemilu. Kita disuruh ikut memilih.

Peneliti : selain pengarahan untuk tidak menjadi golput, apa ada pengarahan lain, misal waktu kampanye, atau waktu pemungutan suara?

Muhammad Alki Hasan: untuk waktu kampanye kita diarahkan agar menghadiri pertemuan kampanye yang ada di desa Sukapura ini.

Peneliti : apa hal yang didapatkan waktu menghadiri pertemuan kampanye itu?

Muhammad Alki Hasan: ya waktu kampanye itu calon bupati memperkenalkan diri, tentang darimana asalnya, apa sukunya, apa jabatan sebelum mencalonkan diri, apa program yang akan diberikan kalau jadi bupati, ya perkenalan biasa aja.

Peneliti : kalau dari kyai pernah nggak kasih saran untuk milih siapa diantara dua calon itu?

Muhammad Alki Hasan: kalau kasih saran tentang siapa yang harus dipilih itu kyai tidak pernah. Tapi yang disarankan kyai tentang pilihan adalah bagaimana menentukan pilihan. Makanya kita disuruh untuk menghadiri pertemuan kampanye itu. Padahal biasanya malam hari kita nggak dikasih izin keluar pondok. Tapi waktu kampanye itu kita diizinkan keluar pondok. Kata kyai biar tau siapa calon bupatinya, jadi nanti bisa tentukan pilihan sendiri. Siapa yang lebih pantas untuk menjadi bupati lampung barat.

Peneliti : pernah nggak kalau masa kampanye itu calon bupatinya datang kepondok?

Muhammad Alki Hasan: kalau datang kepondok nggak pernah. Pertemuan kampanyenya di rumah warga sini aja. Waktu itu juga kan diadakan turnamen bola voli putra, sponsornya dari faisol (cawabup no 2-red), waktu itu dia hadir dilapangan. Tapi nggak mampir ke pondok. Cuma lewat aja

Peneliti : waktu pertemuan kampanye itu kyai ikut hadir juga apa nggak?

Muhammad Alki Hasan: nggak. Kyai nggak ikut hadir, cuman nyuruh santri sama ustadz aja, kalau ada yang mau ikut pertemuan disuruh ikut. Tapi kalau yang mau di pondok aja ya nggak papa. Nggak wajib hadir semua

Peneliti : banyak yang hadir nggak santri dan ustadz waktu pertemuan kampanye itu?

Muhammad Alki Hasan: ya banyak, hampir semua santri yang sudah memiliki hak pilih ikut hadir dalam pertemuan kampanye itu, cuman ada beberapa yang nggak ikut hadir karena pertemuannya malam dan ada santri yang baru sembuh, jadi dia tidak ikut.

Peneliti : mengenai madding yang ada di masjid pondok ini, bagaimana pemanfaatannya saat pemilu pada 2017?

Muhammad Alki Hasan: santri kita ini kan hampir 400 orang jumlahnya, jadi dengan sekian banyaknya santri, tentu daya fahamnya akan berbeda-beda, ada yang dengan mendengar tausiyah atau ceramah dari ustadz dan kyai sudah langsung faham, ada juga yang tidak langsung faham dengan apa yang disampaikan kyai saat ceramah, makanya peringatan mengenai kejujuran saat memilih dan saat kampanye, serta pesan kyai yang menganjurkan para santri dan ustadz untuk ikut menjadi pengontrol keadaan agar tidak terdapat kecurangan-kecurangan, atau pesan kyai mengenai cara menentukan pilihan yang tepat kita jadikan sebuah karya tulis atau kata-kata bijak yang kemudian kita pasang di madding ini, sehingga semua santri bisa membacanya, dan bagi yang lambat dalam pemahaman bisa membacanya sampai berulang-ulang, sehingga makna yang terkandung dalam pesan itu dapat benar-benar difahami oleh para santri maupun ustadz, atau bahkan masyarakat sekitar, karena ini kan posisi maddingnya ada di masjid yang setiap waktu kita pakai sebagai tempat sholat berjamaah, baik itu santri, ustadz, maupun masyarakat sekitar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, Kode Pos 35131 Telp (0721) 78088 / Fax 780422

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SELASA 6 FEBRUARI 2018, PUKUL
13:00 SIANG DI MASJID JAMI' ALKHAIRIYAH PONDOK PESANTREN MIFTAHUL
HUDA 06)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Arif Rahman
Umur : 27
Jabatan : Sekretaris Rois Pondok Pesantren Miftahul Huda 06.
Alamat : dusun Simpang Cempaka kecamatan Sekincau, Lampung Barat
Pekerjaan : santri

II. HASIL WAWANCARA

Peneliti : apakah anda sudah berada di pondok pesantren ini saat pemilu pada 2017 Lampung Barat kemarin?

Arif Rahman: iya saya sudah menjadi santri waktu itu.

Peneliti : apakah anda sudah ikut memilih waktu itu?

Arif Rahman : iya. Saya sudah ikut memilih.

Peneliti : dimana anda memilih waktu itu?

Arif Rahman: saya memilih di Sukapura saja, mengusulkan A5 ke fihak kelurahan. Soalnya saya belum mau pulang ke sekinau waktu itu

Peneliti : adakah pengarahan dari kyai tentang pemilihan umum 2017 tersebut?

Arif Rahman: pengarahan yang diberikan kyai hanya pengarahan supaya bisa menentukan pilihan dengan objektif dan berfokus demi kemajuan bersama,.

Peneliti : selain pengarahan untuk bisa menentukan pilihan dengan baik, apa ada pengarahan lain, misal waktu kampanye, atau waktu pemungutan suara?

Arif Rahman: untuk waktu kampanye kita diarahkan agar menghadiri pertemuan kampanye. yang ada didesa Sukapura ini. Kalau waktu mau pemungutan suara, saya sendiri bahkan tidak bertemu kyai waktu itu, artinya kyai nggak ngasih pengarahan ke saya waktu pemungutan suara.

Peneliti : apa hal yang didapatkan waktu menghadiri pertemuan kampanye itu?

Arif Rahman: ya waktu kampanye itu calon bupati memperkenalkan diri secara umum, tidak ada yang pakai bagi-bagi uang atau sejenisnya..

Peneliti : kalau dari kyai pernah nggak ngasih saran untuk milih siapa diantara dua calon itu?

Arif Rahman: kalau tentang siapa pasangan yang harus di pilih, kyai hanya mengarahkan untuk memilih pasangan yang terbaik diantara dua pasang calon itu. Kyai tidak pernah menyebut harus pasangan nomor 1 atau 2, kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan kita dalam pemilu tersebut.

Peneliti : pernah nggak kalau masa kampanye itu calon bupatinya datang kepondok?

Arif Rahman: setau saya tidak pernah ada pasangan calon bupati yang berkunjung ke pondok ini

Peneliti : waktu pertemuan kampanye itu kyai ikut hadir juga apa nggak?

Arif Rahman: nggak. Kyai nggak ikut hadir, cuman santri sama ustadz aja yang hadir waktu itu

Peneliti : banyak yang hadir nggak santri dan ustadz waktu pertemuan kampanye itu?

Arif Rahman: ya banyak, santri yang tidak memiliki halangan untuk hadir rata-rata pada hadir semua, kecuali yang perempuan, karena pertemuannya malam hari jadi nggak ikut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung, Kode Pos 35131 Telp (0721) 78088 / Fax 780422

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SENIN 5 FEBRUARI 2018, PUKUL
09:00 PAGI DI KANTOR PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA 06)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Abdul Hadi Al-Ghifari
Umur : 35
Jabatan : Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Huda 06.
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : desa Sukapura, kecamatan Sumberjaya Lampung Barat

II. HASIL WAWANCARA

Peneliti : bagaimana pandangan bapak mengenai pemilu pada 2017 Lampung Barat kemarin, khususnya yang ada di desa Sukapura?

Abdul Hadi Al-Ghifari: dari pandangan saya pemilu yang dilakukan pada tahun 2017 kemarin sudah berlangsung dengan cukup adil. Dari penyelenggaraan kampanye yang ada di desa Sukapura ini saya tidak menemukan adanya kecurangan, dari pemungutan suara sampai perhitungan suara juga tidak ada kecurangan yang terjadi. Masyarakat desa Sukapura juga sudah memiliki pemahaman yang bagus tentang pemilihan umum. Sebab kartu suara yang rusak karena kesalahan cara memilih sudah sangat jarang ditemukan. Ya paling ada satu dua, mungkin itu milik pemilih yang memang sudah berusia lanjut.

Peneliti : tadi kata bapak tidak ada ditemukan kecurangan baik dari masa kampanye ataupun masa pemungutan suara, mengapa bapak bisa seyakini itu, apakah bapak tergabung dalam panitia pemungutan suara atau bagaimana?

Abdul Hadi Al-Ghifari: iya. Saya memang termasuk dalam panitia penyelenggara pemungutan suara, jadi saya tahu dengan pasti bahwa kecurangan waktu pemungutan suara itu

tidak terjadi. Kalau masa kampanye saya hanya mendengar dari apa yang tersebar di masyarakat. Karena sehari-hari selain mengajar di pondok pesantren saya bekerja sebagai buruh tani atau bangunan, jadi saya sangat membaaur dengan masyarakat desa Sukapura. Kalau memang ada isu-isu tentang money politik atau sejenisnya, saya pasti sudah mendengar itu dari masyarakat. Buktinya saya tidak mendengar ada berita tentang kecurangan itu, makanya tadi saya berani bilang kalau kecurangan pada masa kampanye itu tidak terjadi di desa Sukapura.

Peneliti : apakah fihak pondok pesantren memberi saran khusus mengenai pengawasan terhadap pemilukada tersebut pak?

Abdul Hadi Al-Ghifari: iya. Dari fihak pondok pesantren itu ada pengarahan atau saran. Kita diberikan saran untuk membantu memberikan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa yang namanya melakukan kecurangan dalam pemilu itu merupakan perbuatan yang sangat fatal. Sebab jika yang dihasilkan adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab, maka seluruh masyarakat Lampung Barat yang akan terzalimi jika dia melakukan tindakan pelanggaran diwaktu dia memimpin. Artinya kita sudah membantu seseorang yang tidak bertanggungjawab untuk menduduki jabatan sentral di kabupaten Lampung Barat.

Peneliti : kapan waktu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tersebut pak?

Abdul Hadi Al-Ghifari: dimana saja ada kesempatan. Dalam posisi kita sebagai ustad itu banyak sekali masyarakat yang bertanya mengenai berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Baik saat kebetulan bersilaturahmi, atau sengaja datang untuk menanyakan permasalahan mereka. Selain itu juga ada acara kultum sebelum membaca surat yasin dan tahlil pada malam jum'at. Ya diwaktu-waktu seperti itulah kita memberikan pesan-pesan kejujuran dan keadilan itu.

Peneliti : apakah kyai pernah memiliki pertemuan khusus dengan salah satu calon bupati tahun itu pak?

Abdul Hadi Al-Ghifari: kalau pertemuan khusus setahu saya itu tidak ada. Kyai memang orang yang tertutup terhadap politik-politik semacam itu. Beliau tidak pernah melakukan pertemuan atau menjalin kerjasama dengan salah satu calon bupati pada saat itu. Bukan karena beliau tidak kenal, parosil (cabup no 1-red) dan faisol (cawabup no 2-red) itu sangat kenal dengan kyai. Tapi pada saat pemilu saya tidak melihat bahwa keduanya melakukan silaturahmi kepada kyai. Karena seperti yang saya katakana tadi, sudah berapa kali pemilu, bauk kades atau legislative dan bupati, kyai memang tertutup untuk melakukan pertemuan terhadap calon-calon pemimpin tersebut.

Peneliti : bagaimana kyai memberikan saran untuk menentukan pilihan pada waktu pemilu pada 2017 itu pak?

Abdul Hadi Al-Ghifari: beliau memberikan pemahaman tentang apa makna pemungutan suara yang sebenarnya. Kemudian karena besarnya efek yang dihasilkan oleh kegiatan pemungutan suara itu, maka masyarakat, khususnya santri dan ustad perlu untuk menentukan pilihan yang tepat. Kita disuruh untuk mengikuti beberapa pertemuan kampanye, selain untuk mengenal calon pemimpin juga untuk mengawasi kegiatan kampanye itu. Jika dirasa belum cukup pengenalan dari waktu pertemuan itu, maka kita perlu mencari informasi mengenai siapa dan bagaimana kiprahnya dalam mewakili atau memimpin rakyat.